

**ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN
DEMONSTRASI MAHASISWA TENTANG
PENOLAKAN RUU KUHP DI HARIAN WASPADA
DAN ANALISA MEDAN EDISI SEPTEMBER 2019**

SKRIPSI

Oleh:

RATNA SARI HARAHAP

NPM 1603110158

Program Studi Ilmu Komunikasi

Konsentrasi Jurnalistik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **RATNA SARI HARAHAP**
N.P.M : 1603110158
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : **ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DEMONSTRASI MAHASISWA TENTANG PENOLAKAN RUU KUHP DI HARIAN WASPADA DAN ANALISA MEDAN EDISI SEPTEMBER 2019**

Medan, 29 Juni 2020

Dosen Pembimbing



NIRWAN SYAH PUTRA, S.Sos., M.Sos

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.LKom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dekan,



Dr. ARIFIN SA'ADAH, S.Sos, MSP.

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **RATNA SARI HARAHAP**
N P M : 1603110158
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Pada hari, tanggal : Selasa, 28 Juli 2020
W a k t u : Pukul 08.30 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom

PENGUJI II : CORRY NOVRICA AP.SINAGA, S. Sos., M.A.

PENGUJI III : NIRWASYAH PUTRA, S.Sos., M.Sos

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, RATNA SARI HARAHAP, NPM 1603110158, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 29 Juli 2020

Saya menyatakan,


METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPIAH
RATNA SARI HARAHAP

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alaminn, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Salam dan shalawat tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang memberikan segala ilmu pengetahuan kepada ummat yang sangat berguna baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat kelak.

Skripsi merupakan salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan **“Analisis Framing Pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa Tentang Penolakan RUU KUHP di Harian Waspda dan Analisa Medan Edisi September 2019”**. skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena dalam proses penyelesaiannya tidak sedikit kesulitan dan hambatan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa doa, usaha, bimbingan, dan juga arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Pamusuk Harahap dan Ibunda Mutiara Siregar, yang selalu memberikan didikan, dukungan, materi, do'a, nasehat sehingga anak mu ini bisa memperoleh gelar S.I. Kom.

2. Kepada kakak-kakak dan abang tersayang Nurintan Harahap, Lasma Wati Harahap, Ahmad Dahlan Harahap dan Purnama Sari Harahap, yang membantu adikmu memecahkan masalah dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kakak ipar dan abang ipar Asamuiddin Laia, Novita Sari Pakpahan, Kosasih dan Indra Lumban Tobing, yang mendo'akan adik mu agar dipermudah dan dilancarkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Nirwansyah Putra Panjaitan, S.Sos., M.Sos. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing, medidik, mendukung, dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Abrar Adhani S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Nurhasanah Nasution S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Akhyar Anshori S.Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

11. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik penulis sampai sekarang ini.
12. Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu surat menyurat penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada Bapak/Ibu dari kantor Harian Waspada dan Harian Analisa Medan yang telah memberikan data yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi penulis.
14. Kepada kakak Siti selaku operator di kantor Harian Analisa yang membantu penulis dalam proses pengambilan data yang digunakan sebagai objek penelitian.
15. Kepada seseorang yang sering kupanggil sosen Idam Sargawi Gultom yang tidak pernah bosan memberikan semangat, mendengarkan keluhan penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Kepada para sahabat Siti Nur Aminah Sari Hasibuan, Tukma Putry Wanti Nasution, Aulia Ramadhani Harahap dan Yesi Wulandari Tanjung, yang memberikan semangat kepada penulis.
17. Kepada bidadari kelas jurnalistik Nurajijah Pasaribu, Febriana Ginting dan Reni Syahfitri, yang selalu membantu memberikan informasi, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

18. Kepada teman seperjuangan Reni Monika Febriyanti Malayu dan Yunarti, yang selalu memberikan masukan, motivasi dan membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
19. Kepada adek Sindi Pratiwi yang setia menemani dan memberikan fasilitas untuk berjalannya mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan do'a dan dukungan hingga dapat diselesaikannya skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan pembaca media cetak koran Harian Waspada dan Harian Analisa Medan. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan ini. Penulis berharap Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 19 Juni 2020

Penulis

Ratna Sari Harahap

Analisis Framing Pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa Tentang Penolakan RUU KUHP di Harian Waspada dan Analisa Medan Edisi September 2019

**Ratna Sari Harahap
1603110158**

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan pembingkai (*framing*) mengenai pemberitaan demonstrasi mahasiswa tentang penolakan RUU KUHP. Dua media cetak yang dipilih sebagai sasaran penelitian yaitu Harian Waspada dan Harian Analisa. Kedua media cetak ini merupakan media pers secara tertulis yang sangat berpengaruh dalam kehidupan pers di Medan, Sumatera Utara Indonesia. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui berita demonstrasi mahasiswa tentang penolakan RUU KUHP yang di bingkai oleh kedua media cetak tersebut di atas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis *framing* milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosocki. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati teks berita menggunakan empat komponen struktur analisis *framing*, yaitu sintaksis (mengidentifikasi masalah), skrip (strategi cerita dalam teks berita), tematik (mengungkapkan pandangan wartawan dalam teks berita), retorik (menggunakan tata bahasa dalam teks berita). Hasil analisis *framing* terhadap teks berita memperlihatkan kedua media cetak berbeda dalam membingkai berita demonstrasi mahasiswa tentang penolakan RUU KUHP. Penelitian ini menemukan, Harian Waspada menggunakan *frame* di bidang sosial dan cenderung menyoroti peristiwa demonstrasi mahasiswa tentang penolakan RUU KUHP lebih memihak kepada masyarakat, sedangkan Harian Analisa menggunakan *frame* di bidang hukum dan sosial politik dan lebih memihak kepada pemerintah. Sehingga kedua media tersebut belum netral sesuai dengan objektivitas jurnalistik.

Kata kunci: Analisis Framing Pan dan Kosicki, Media Cetak, Demonstrasi Mahasiswa, Waspada, Analisa

DAFTAR ISI

HAL. BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
HAL. PENGESAHAN	
HAL. PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Pembatasan Masalah.....	4
1.5. Manfaat Penelitian.....	4
1.6. Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1. Komunikasi Massa.....	7
2.1.1 Teori Agenda Setting	9
2.2. Media Cetak	10
2.3. Berita	13

2.4. Hak Asasi Manusia (HAM).....	14
2.5. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).....	16
2.6. <i>Framing</i> Berita	20
2.7. Harian Waspada dan Analisa	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	27
3.2. Kerangka Konsep.....	27
3.3. Defenisi Konsep	28
3.4. Kategorisasi	30
3.5. Informan/Narasumber	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data	31
3.7. Teknik Analisis Data.....	31
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	34
4.2. Pembahasan	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kerangka <i>framing</i> Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.....	30
Tabel 2.	Analisis Framing Pemberitaan Harian Analisa Edisi 21 September 2019 dan Harian Waspada Edisi 20 September 2019.....	35
Tabel 3.	Analisis Framing Pemberitaan Harian Analisa dan Waspada Edisi 25 September 2019	45
Tabel 4.	Analisis Framing Pemberitaan Harian Analisa dan Waspada Edisi 26 September 2019	54
Tabel 5.	Resume Unit Analisis Berita Harian Analisa	65
Tabel 6.	Resume Unit Analisis Berita Harian Waspada.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Konsep	27
-----------	-----------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Persetujuan Judul Skripsi	78
Lampiran 2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing	79
Lampiran 3. Permohonan Seminar Proposal Skripsi	80
Lampiran 4. Undangan Seminar Proposal Skripsi.....	81
Lampiran 5. Berita Acara Bimbingan Skripsi	82
Lampiran 6. Undangan/Panggilan Ujian Skripsi	83
Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat, berekspresi, dan media massa adalah hak asasi manusia yang mendapat perlindungan dari Pancasila, UUD 1945. Media massa digunakan masyarakat sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi yang sangat luas. Selain itu, juga digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Meningkatkan pengetahuan manusia dan kualitas manusia. Dalam mewujudkan itu semua tentunya harus ada kemerdekaan pers, wartawan Indonesia harus menyadari kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama yang ada.

Media memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya kebutuhan manusia akan informasi ataupun berita yang memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang ingin dicapai atau diperoleh dalam hidupnya. Selain itu, media memiliki kekuatan utama dalam membentuk apa yang diketahui tentang dunia dan dapat pula menjadi sumber utama berbagai ide dan opini serta mempengaruhi cara berfikir dan bertindak manusia.

Salah satu media yang menyalurkan informasi ialah media massa. Media massa meliputi media cetak seperti koran, tabloid, majalah, dan media elektronik seperti televisi, radio dan internet. Salah satu dari media di atas yaitu media cetak seperti surat kabar (koran) merupakan saluran informasi yang dianggap sudah

tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Karena selain peristiwa yang memuat di dalamnya selalu terbaru, berita tersebut juga mengandung unsur penting untuk diketahui oleh khalayak luas.

Ada hal yang penting dan patut diketahui bahwa media tidak pernah bisa membuat pemberitaan yang netral atau tidak mungkin objektif. Hal ini disebabkan karena ada kepentingan-kepentingan lain, misalnya kepentingan media, pemilik media, atau wartawan itu sendiri, yang terdapat dalam sebuah pemberitaan media massa.

Dalam pemberitaannya, media memang dituntut untuk membuat berita yang nyata, yaitu fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Namun, ada kepentingan-kepentingan lain yang pada akhirnya membuat realitas berita berbeda dengan realitas sesungguhnya. Ada fakta-fakta yang diangkat menjadi berita, ada juga yang tidak. Hal ini dapat dilihat dari siapa narasumber yang ditanyai, isu-isu apa yang dominan diangkat dari suatu peristiwa, ataupun posisi berita dalam suatu media.

Media sebagai institusi informasi, dapat pula dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses-proses perubahan sosial dan politik. Kontroversi-kontroversi yang terjadi dikalangan masyarakat dengan sistem pemerintahan justru menjadi sebuah penolakan karena aturan yang ditetapkan sangat bertentangan bagi masyarakat. Mahasiswa salah satunya yang paling berperan penting dalam menegakkan inspirasi masyarakat, tentunya hangat di perbincangkan di bulan September yang lalu dan sangat di soroti oleh semua media di setiap wilayah Indonesia.

Dalam menganalisis framing tentunya dibutuhkan media pembanding. Penulis memilih media cetak (koran) Harian Waspada dan Harian Analisa Medan. Jika dilihat dari berita-berita yang memuat di dua media tersebut, penulis melihat adanya kecenderungan di salah satu media yang membingkai berita tersebut. Maka dari situlah penulis ingin melihat sejauh mana pembingkai berita tersebut dimuat oleh wartawan.

Berita yang akan penulis teliti adalah pemberitaan yang memuat tentang demonstrasi mahasiswa karena berita tersebut merupakan berita penting yang harus diketahui kebenarannya. Selain berita demonstrasi mahasiswa terkait dengan kepentingan masyarakat. Penulis juga melihat bagaimana media memuat berita sesuai fakta peristiwa dilapangan. Selain itu, demonstrasi mahasiswa soal RUU KUHP ini dilakukan massif hampir di seluruh Indonesia dan dilakukan secara berkesinambungan. Bahkan, beberapa di antaranya terjadi bentrokan dengan aparat keamanan. Dalam pengamatan penulis, ini salah satu demonstrasi mahasiswa yang cukup besar yang sudah lama tidak terjadi.

Agar memberikan informasi yang benar dan cepat terhadap masyarakat maka media atau pers dituntut untuk bisa menambah pengetahuan pembacanya dengan menyajikan informasi atau berita yang berdasarkan fakta dari suatu peristiwa.

Dari penjelasan di atas penulis dapat mengangkat judul skripsi “Analisis Framing Pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa Tentang Penolakan RUU KUHP di Harian Waspada dan Analisa Medan Edisi September 2019”. Untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan dan menambah wawasan lebih luas lagi tentang bagaimana media membingkai berita politik.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana Harian Waspada dan Harian Analisa membingkai berita demonstrasi mahasiswa tentang penolakan RUU KUHP edisi September 2019”?

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, karena keterbatasan sumber cetak dari berita edisi september 2019 di harian Waspada dan Analisa Medan yang mampu peneliti dapatkan, peneliti membatasi edisi yang akan diteliti hanya pada satu minggu di bulan September 2019, tanggal 19-26 September 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana Harian Waspada dan Harian Analisa membingkai berita demonstrasi mahasiswa tentang penolakan RUU KUHP edisi September 2019.
2. Untuk membandingkan bagaimana konstruksi pemberitaan demonstrasi mahasiswa tentang penolakan RUU KUHP edisi September 2019 di Harian Waspada dan Harian Analisa.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian *Framing* ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi berguna bagi pengembangan penelitian jurusan jurnalistik, khususnya bagi peneliti berbasis kualitatif yang berkaitan dengan media massa khususnya penelitian menggunakan analisis *framing*. Untuk

menambah wawasan yang lebih luas tentang ilmu komunikasi, khususnya yang berhubungan dengan fungsi media, dalam hal ini khususnya media cetak.

2. Untuk menambah pengetahuan pembaca dalam pembedaan berita demonstrasi mahasiswa tentang penolakan RUU KUHP edisi September 2019.
3. Untuk memahami dan mempraktekkan teknik pengumpulan, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan dari suatu penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab dengan uraian masing-masing dengan substansi sebagai berikut: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Pembatasan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II: URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan menjelaskan data atau teori permasalahan pada topik skripsi yang berkaitan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan rancangan penelitian, prosedur penelitian, sampel/unit penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan metode ujinya. Adapun sistematika pada bab ini yaitu: Jenis penelitian, Kerangka konsep, Defenisi konsep, Kategorisasi, Informan/narsumber, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Lokasi dan waktu penelitian dan Deskripsi lokasi penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang: Hasil penelitian dan Pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta pesan yang dihasilkan, pembaca/pendengar/penonton yang akan coba diraihinya, dan efeknya terhadap mereka. Komunikasi massa merupakan disiplin kajian ilmu sosial yang relatif muda jika dibandingkan dengan ilmu psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Sekarang ini komunikasi massa sudah dimasukkan dalam disiplin ilmiah. (Nurudin, 2013:2).

Pengertian komunikasi massa antara lain diberikan oleh pakar ahli. yaitu, sebagai berikut:

Bittner dalam bukunya *Mass ACommunication: An Intruduction* (1980), mendefenisikan komunikasi massa adalah pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. (Roudhonah, 2019:167).

Defleur dan Dennisdalam bukunya “*Understanding Mass Communication*” (1985), mendefenisikan komunikasi massa adalah suatu proses dalam mana komunikator-komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan secara terus-menerus menciptakan makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara. (Roudhonah, 2019:167).

Gebner mendefenisikan bahwa komunikasi massa adalah menghasilkan suatu produk berupa pesan-pesan komunikasi. Produk tersebut disebarkan,

didistribusikan kepada khalayak luas secara terus menerus dalam jarak waktu yang tetap, misalnya harian, mingguan, dwimingguan, atau bulanan. (Romli, 2016:2).

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah proses dimana berlangsungnya komunikasi disebuah organisasi yang membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak luas melalui media.

Dimana organisasi-organisasi media ini akan menyebarkan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat, lalu informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Dalam komunikasi massa, media massa menjadi kepentingan tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan, dan menyampaikannya kepada khalayak.

Fungsi komunikasi massa merupakan untuk menyebarkan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat terutama dalam bidang penyiaran dan media pandang dengar (audiovisual), menyebabkan media massa telah memiliki banyak perubahan. (Cangara, 2012:69).

Sesungguhnya, fungsi jurnalistik bagi umat manusia lebih dari sekadar itu. Sedikitnya ada empat fungsi jurnalistik. Dalam buku (Zaenuddin HM, 2011:9).Pertama, menghimpun dan menyebarkan informasi bagi khalayak masyarakat. Kedua, memberikan pendidikan bagi khalayak masyarakat. Ketiga,

sebagai media hiburan bagi khalayak masyarakat. Keempat, sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ada beberapa efek komunikasi massa yaitu: sebagai fisik, pertama efek ekonomis, ialah komunikasi massa menggerakkan usaha dalam berbagai sektor, seperti produksi, distribusi dan konsumsi jasa media massa. Kedua efek sosial, ialah komunikasi massa akan membawa perubahan pada struktur atau interaksi sosial. Ketiga efek penjadwalan kembali kegiatan sehari-hari, ialah sebelum ada TV orang biasanya pergi tidur malam sekitar pukul 8 dan bangun pagi sekali karena harus berangkat kerja di tempat yang jauh. (Roudhonah, 2019:178-179).

Selain memiliki dampak di bagian efek fisik media massa juga memiliki efek dalam penyampaian pesan. Pertama efek kognitif, dimana seseorang bila sering menonton, membaca media massa maka memberikan pengetahuan, keterampilan maupun kepercayaan. (Roudhonah, 2019:179). Kedua efek afektif, yaitu apa yang disebarkan melalui media massa dapat mengubah pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak. (Roudhonah, 2019:180). Ketiga efek konatif, yaitu dampak pesan media massa dapat menimbulkan pola-pola tindakan, kegiatan atau perilaku nyata yang dapat diamati. (Roudhonah, 2019:181).

2.1.1 Teori *Agenda Setting*

Agenda Setting menurut McCombs dan Shaw menjelaskan bahwa media massa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir *audience* yang terkena terpaan informasinya. McCombs dan Shaw menerangkan lebih lanjut bahwa media massa mempunyai kemampuan untuk

membuat masyarakat menilai sesuatu yang penting berdasarkan apa yang disampaikan media.

Contoh kasus *Agenda Setting* adalah tayangan berita di televisi. Ketika marak kasus kekerasan seksual pada anak, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya meski sebenarnya mereka tidak mengalami secara langsung.

Tugas pertama McCombs dan Shaw adalah mengukur *media agenda*, dimana pengukuran kriteria berdasarkan posisi dan panjang *story* atau informasi yang disampaikan, semakin penting pula kedudukan informasi tersebut. Informasi yang dianggap penting oleh media akan disampaikan terus-menerus, contohnya bisa menemukan informasi di setiap *headline* berita televisi, media cetak, maupun media elektronik. Dikutip dari (PakarKomunikasi.com).

2.2 Media Cetak

Macam-macam komunikasi massa menurut Everett M. Rogers bahwa selain media massa yang modern (tv, radio, surat kabar dan Film), terdapat pula media massa yang tradisional, seperti teater rakyat, juru dongeng keliling, juru pantun, dan lain-lain. (Roudhonah, 2019:171). Namun, dalam pembahasan disini difokuskan pada media massa modern saja, yakni pers.

Apa yang dimaksud dengan pers? Pers berasal dari perkataan Belanda *pers* yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers merupakan pandangan dari kata *press* yang dalam bahasa Inggris berarti menekan atau mengepres. Jadi secara harfiah kata *pers* atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Tetapi, sekarang kata pers atau

press ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun oleh wartawan media cetak.

Berdasarkan uraian diatas, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dalam media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio maupun internet. (Kusumaningrat, 2005:17).

Media cetak adalah sebuah media yang berfungsi menyebarluaskan informasi kepada khalayak dan tentunya memiliki manfaat terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat luas, disampaikan dalam bentuk tertulis misalnya: surat kabar seperti koran.

Selama penerbitnya menghormati aturan dan hukum yang ada, koran bisa memberitakan apa saja. Jika koran tidak suka dengan pemerintahan, misalnya koran itu bisa menyatakannya secara terang-terangan. Kalau koran memuat foto seronok lalu di protes pembacanya, ia bisa membuat dalih apa saja demi meredam protes. Kecaman dari mana pun-politisi, artis atau koran saingan-bisa ditangani dengan relatif mudah. (Rivers. Dkk, 2003:169)

Surat kabar adalah lembaran hasil dari cetakan media yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit berdasarkan waktu yang

berjalan, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja tempat peristiwa dengan guna untuk diketahui masyarakat.

2.3 Berita

Unsur layak berita yaitu yang membuat suatu berita layak untuk kalimat, penulis ingin mengajak pembaca menyimak isi pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Yang berbunyi “Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya”. (Kusumaningrat, 2005:47)

Dikutip dari buku (Barus, 2010:26-27), memberikan gambaran defenisi berita menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Willard C. Bleyer, berita adalah suatu kejadian aktual yang diperoleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena menarik atau mempunyai makna bagi pembaca.

William S. Maulsby, berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi yang dapat menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut.

Chilton R. Bush, berita adalah laporan mengenai peristiwa yang penting diketahui masyarakat dan juga laporan peristiwa yang semata-mata menarik karena berhubungan dengan hal yang menarik dari seseorang ataupun sesuatu dalam situasi yang menarik.

Eric C. Hepwood, berita adalah laporan pertama dari kejadian penting yang dapat menarik perhatian umum.

Curtis MacDougall, berita adalah apa saja yang menarik hati orang dan berita yang terbaik adalah yang menarik hati orang sebanyak-banyaknya.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui oleh khalayak luas.

Sedangkan, sesuai dengan penelitian ini, yang terkait dengan peristiwa politik, maka berita politik merupakan berita yang menyangkut kegiatan politik atau peristiwa di sekitar masalah-masalah ketatanegaraan dan segala hal yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan negara. Politik di sini harus diartikan sebagai upaya manusia untuk menata kehidupan rakyat, pemerintahan dan negara demi mencapai suatu tujuan dan cita-cita bersama yang luhur, yaitu perbaikan hidup dan nasib bangsanya. (Barus, 2010:41).

2.4 Hak Asasi Manusia (HAM)

Setiap masyarakat berhak mengutarakan inspirasinya terhadap pemerintahan terutama bagi mahasiswa sebagai generasi muda yang ikut serta menegakkan inspirasi tersebut. Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat sekumpulan orang dan biasanya hal ini terjadi karena adanya pertentangan-pertentangan terhadap sistem pemerintahan yang sering disebut dengan kontroversi.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan yang lain. Akan tetapi, tidak sedikit yang unjuk rasa menyebabkan perusakan terhadap benda-benda.

Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas. Sepanjang sejarah, mahasiswa di berbagai negara mengambil peran penting dalam sejarah suatu negara.

Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dan setiap negara tidak terlepas dari yang namanya kekuasaan, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. (Budiardjo, 2007:17-18).

Apalagi di Indonesia dalam UUD 1945 sudah mengatur tentang HAM pasal kebebasan berpendapat, dalam buku (El Muhtaj, 2005:105), yang tercantum pada bab XA tentang HAM, yaitu:

pasal 28E, (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati

nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28I, (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan orang yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J, (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2.5 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Pasal Kontroversial RUU KUHP dan Masalahnya, seperti dikutip dari Idhom (2019) tergambar dalam uraian dibawah ini:

2.5.1 Pasal RUU KUHP soal Korupsi

Sejumlah pasal di RUU KUHP memuat hukuman bagi pelaku korupsi yang lebih rendah daripada UU Tipikor. Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai hal ini bisa memicu praktik 'jual-beli' pasal. Misalnya, pasal 603 RUU KUHP mengatur pelaku korupsi dihukum seumur hidup atau paling sedikit 2 tahun penjara dan maksimal 20 tahun. Pasal 604 RUU KUHP mengatur hukuman sama persis bagi pelaku penyalahgunaan wewenang untuk korupsi. Lalu, pasal 605 mengatur hukuman ke pemberi suap minimal 1 tahun bui dan maksimal 5 tahun. Pasal 605 pun mengancam PNS dan penyelenggara negara penerima suap dengan penjara minimal 1 tahun, serta maksimal 6 tahun.

2.5.2 Pasal RUU KUHP tentang Penghinaan Presiden

Pasal kontroversial RUU KUHP yang lain terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal 218 mengancam pelaku dengan penjara maksimal 3,5 tahun. Di pasal 219, pelaku penyiaran hinaan itu diancam 4,5 tahun bui. Di pasal 220 RUU KUHP, dijelaskan bahwa perbuatan ini menjadi delik apabila diadakan oleh presiden atau wakil presiden.

2.5.3 Pasal RUU KUHP tentang Makar

RUU KUHP mengatur pidana makar melalui pasal 167, 191, 192 dan 193. Pelaku makar terhadap presiden dan NKRI diancam hukuman mati, seumur hidup atau bui 20 tahun. Makar terhadap pemerintah yang sah, juga diancam penjara 12 dan 15 tahun. Pasal 167 menyebut: "Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut."

2.5.4 Pasal RUU KUHP soal Penghinaan Bendera

RUU KUHP juga mengatur pemidanaan terkait penghinaan bendera negara. Ketentuan ini diatur pasal 234 dan 235. Di pasal 235, diatur pidana denda maksimal Rp10 juta bagi mereka yang: (1) memakai bendera negara untuk reklame/iklan komersial; (2) mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; (3) mencetak, menyulam dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain, atau memasang lencana atau benda apa pun pada bendera negara; dan (4) memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, tutup barang, yang menurunkan kehormatannya.

2.5.5 Pasal RUU KUHP terkait Alat Kontrasepsi

Pasal kontroversial lainnya di RUU KUHP ialah soal pemidanaan promosi kontrasepsi. Pasal 414 mengatur: orang yang mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, menunjukkan untuk bisa memperoleh alat pencegah kehamilan (kontrasepsi) kepada Anak dipidana denda maksimal Rp1 juta." (kategori I).

2.5.6 Pasal RUU KUHP soal Aborsi

Pemidanaan terkait aborsi diatur pasal 251, 415, 469 dan 470. Misalnya, pasal 469 mengatur hukuman bagi perempuan yang menggugurkan kandungannya, maksimal 4 tahun bui. Orang yang menggugurkan kandungan perempuan dengan persetujuannya juga bisa dibui maksimal 5 tahun, sesuai isi pasal 470 RUU KUHP. Pasal ini dinilai berpotensi mengkriminalisasi korban perkosaan yang hamil dan memutuskan untuk menggugurkan kandungannya.

2.5.7 Pasal RUU KUHP soal Gelandangan

RUU KUHP juga mengatur pemidanaan gelandangan. Pasal 431 mengancam gelandangan dengan denda maksimal Rp1 juta. Direktur Program ICJR Erasmus Napitupulu mendesak penghapusan pasal ini sebab ia warisan kolonial yang menilai gelandangan sebagai: Orang tidak berguna akibat kesalahan dalam hidupnya.

2.5.8 Pasal RUU KUHP tentang Zina dan Kohabitasi

Pasal 417 dan 419 mengatur pidana perzinaan dan kohabitasi (hidup bersama sebagai suami-istri di luar ikatan perkawinan). Pasal 417 mengatur hukuman bagi mereka yang berzina maksimal bui 1 tahun atau denda Rp10 juta. Pidana ini diatur sebagai delik aduan dari suami, istri, orang tua dan anak. Sementara pasal 418 mengancam pelaku kohabitasi dengan penjara 6 bulan dan denda Rp10 juta. Pidana ini delik aduan. Kepala desa termasuk yang bisa mengadakan tindak kohabitasi ke polisi.

2.5.9 Pasal RUU KUHP soal Pencabulan

Pasal 420 menjadi bermasalah karena mengatur pemidanaan pencabulan dengan memberikan tekanan kata: "terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya."

2.5.10 Pasal Pembiaran Unggas dan Hewan Ternak

Pasal 278 RUU KUHP secara khusus mengatur: orang yang membiarkan unggas miliknya berjalan di kebun atau tanah telah ditaburi benih/tanaman milik orang lain terancam denda sampai Rp10 juta. Lalu, pasal 279 juga mengancam setiap orang yang membiarkan hewan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami, dengan pidana denda maksimal Rp10 juta (kategori II). Bahkan pasal 279 ayat 2 menyatakan, hewan ternak yang dilibatkan dalam pelanggaran ini dapat dirampas negara.

2.5.11 Pasal RKUHP tentang Tindak Pidana Narkoba

Pasal 611- 616 RUU KUHP terkait narkoba, juga dikritik sebab membuat pendekatan pidana semakin diutamakan di penanganan masalah narkoba. Aliansi menilai pasal-pasal itu menguatkan stigma narkoba sebagai masalah pidana saja. Padahal, banyak negara di dunia memproklamirkan pembaruan kebijakan narkoba dengan pendekatan kesehatan warga. Di samping itu, pendekatan pidana yang berfokus pada pemberantasan suplai narkoba dianggap tidak efektif.

2.5.12 Pasal tentang Contempt of Court

Pasal di RUU KUHP tentang penghinaan terhadap badan peradilan atau contempt of court juga dikritik. Pasal 281 huruf b mengatur pidana denda Rp10 juta bagi mereka yang: "Bersikap tak hormat terhadap hakim atau persidangan

atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan.” Menurut catatan Aliansi, unsur “bersikap tidak homat” di Pasal 281 huruf b tidak dijabarkan secara terang pada bagian penjelasan. Selain itu, menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur, mestinya sah sebagai kritik.

2.5.13 Pasal Tindak Pidana terhadap Agama

Ketentuan terkait tindak pidana terhadap agama diatur pasal 304-309. Di antara kritik Aliansi ke pasal-pasal itu: (1) isinya jauh dari standar pasal 20 ICCPR soal konteks pelarangan propaganda kebencian; (2) hanya melindungi agama yang “dianut” di Indonesia; (3) serta belum memuat unsur penting, yakni perbuatan “dengan sengaja” terkait tindak pidana terhadap agama.

2.5.14 Pasal terkait Pelanggaran HAM Berat (pasal 598-599)

Aliansi mencatat pengecualian asas retroaktif (tak berlaku surut) untuk pelanggaran HAM berat belum diatur buku 1 RKUHP. Padahal, ini diatur UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM pun menyoroti hukuman bagi pelaku genosida di RUU KUHP yang malah lebih rendah dari ketentuan UU 26/2000. RUU KUHP mengatur hukuman 5-20 tahun bui. Adapun UU 26/2000 menetapkan hukuman 10-25 tahun penjara.

2.6 *Framing* Berita

2.6.1 Defenisi

Analisis *framing* adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis *framing* juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.

Salah seorang sosiolog Erving Goffman (1974) dalam buku (Tamburaka, 2012:58), yang membangun kerangka analisis (*analysis frame*) memberikan pemahaman cukup sistematis bagaimana kita membangun pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Goffman tertarik mengamati kesalahan yang sering kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seseorang sering menyalah artikan kesopanan dengan rayuan bagaimana penipu bisa menegelabui orang.

Hal itu karena orang secara terus-menerus bahkan secara radikal mengubah atau mendefinisikan dalam melambangkan situasi, tindakan orang seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini terjadi karena kita masing-masing menerapkan skema perlambangan tertentu. Setiap orang dapat berpindah dari satu realitas ke realitas lain.

Kemampuan manusia untuk menilai dan memikirkan sesuatu memiliki keterbatasan, sehingga kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh memaknai sesuatu bahkan oleh karenanya, karena keterbatasan tersebut relitas kita diatur oleh suatu institusi sosial, dalam konteks komunikasi massa yakni media massa.

Framing (bingkai) bisa dianalogikan seperti bingkai jendela rumah. Bingkai menentukan pandangan sekaligus membatasi pandangan, hal-hal apa yang kita lihat dan tidak kita lihat. Bingkai jendela disebuah hotel misalnya menghadap ke arah jalan raya dan sebagai akibatnya kita hanya melihat pandangan jalan raya, padahal di atas jalan raya tersebut terdapat pemandangan gunung yang indah-pemandangan yang tidak bisa kita lihat karena pemandangan kita dibatasi oleh bingkai jendela. Analogi bingkai jendela ini, bisa diterapkan ke media. Jurnalis meliput peristiwa tidak dengan kepala kosong. Peristiwa

sebaliknya dilihat dengan bingkai atau jendela tertentu, sebagai akibat ada hal yang diberitakan, dan tidak diberitakan. Ada bagian yang diberikan porsi besar dan bagian lain diberikan porsi kecil, dan seterusnya. (Eriyanto, 2018:71).

Framing atau pembingkaiian dalam studi ilmu komunikasi merupakan terminologi yang cukup unik. Satu sisi *framing* sering diacu pada metode analisis teks media dengan pendekatan kritis, namun pada sisi lainnya *framing* sering diacu sebagai sebuah teori media. Lebih luas dari keduanya. *Framing* telah digunakan sebagai pradigma untuk memahami dan menyelidiki komunikasi dan perilaku terkait dalam berbagai disiplin keilmuan seperti psikologi, pengambilan keputusan organisasi, ekonomi, komunikasi kesehatan, kajian media, dan komunikasi politik, (Rendahl, 1995), dalam buku (Syahputra, 2019:15-16). Penjelasan tersebut menjadi premis bahwa *framing* merupakan payung yang memiliki potensi digunakan untuk meneliti apa saja tentang *public relations*.

2.6.2 Konsep *Framing*

Pada dasarnya, analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana khususnya untuk meneliti teks media. Gagasan mengenai *framing*, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955 (Sudibyo, 1999a:23). Dalam buku (Sobur, 2001:161), Mulanya, *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas.

Konsep *framing*, dalam pandangan Entman, secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkap *the power of a communication text*. *Framing*

analysis dapat menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh transfer (atau komunikasi) informasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, ucapan/ungkapan, *news report*, atau novel. *Framing* kata Entman, secara esensial meliputi penseleksian dan penonjolan. Membuat Frame adalah menseleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas, dan membuatnya lebih menonjol di dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempromosikan sebuah defenisi permasalahan yang khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan atau merekomendasikan penanganannya (Siahaan, 2001:80-81) Dalam buku (Sobur, 2001:165).

Berdasarkan konsepnya, Gamson (Sudiby, 1999a:24-27) dalam buku (Sobur, 2001:172), mendefinisikan *framing* dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan kultural yang menghasilkan *framing* dalam level kultural dan pendekatan psikologis yang menghasilkan *framing* dalam level individual. Dalam level kultural, *frame* pertama-tama dapat dimaknai sebagai batasan-batasan wacana serta elemen-elemen konstitutif yang tersebar dalam konstruksi wacana. Sedangkan asumsi dasar dari *framing* level individu adalah bahwa individu selalu bertindak atau mengambil keputusan secara sadar, rasional, dan intensional. Individu selalu menyertakan pengalaman hidup, wawasan sosial, dan kecenderungan psikologisnya dalam menginterpretasikan pesan yang ia terima.

Ada dua aspek dalam *framing*. Pertama, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*).

Bagian mana yang ditekankan dalam realitas? Bagian mana dari realitas yang diberitakan dan bagian mana yang tidak diberitakan? Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih aspek tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lain. Media yang menekankan aspek tertentu, memilih fakta tertentu akan menghasilkan berita yang bisa jadi berbeda kalau media menekankan aspek atau peristiwa yang lain. (Eriyanto, 2002: 81).

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dengan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekan-kankan dengan pemakaian perangkat tertentu: penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar, dan sebagainya. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Akibatnya, aspek tertentu bukan ditonjolkan menjadi menonjol, lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan aspek lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari

konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok, mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. (Eriyanto, 2002: 81-82).

2.6.3 Teknik dan Model Framing

Secara teknis, tidak mungkin bagi seorang jurnalis untuk mem-*fram-ing* seluruh bagian berita. Artinya hanya bagian-bagian kejadian-kejadian (*happening*) penting dalam sebuah berita saja yang menjadi objek *framing* jurnalis. Namun, bagian-bagian kejadian penting ini sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat ingin diketahui khalayak. Aspek lainnya adalah peristiwa atau ide yang diberitakan. Dalam buku (Sobur, 2001:172).

Model analisis *framing* menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dalam tulisan mereka *Framing Analysis: An Approach to News Discourse*, dalam buku (Sobur, 2001:175-176) Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat *framing*, yaitu: sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Keempat dimensi struktural tersebut membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. *Frame* merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu kedalam teks secara keseluruhan. *Frame* berhubungan dengan makna.

Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks.

Struktur sintaksis bisa diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan kisah berita. Dengan demikian struktur sintaksis dapat diamati dari bagan berita (*headline* yang dipilih, *lead* yang dipakai, latar informasi yang dijadikan sandaran, sumber yang dikutip dan sebagainya).

Struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita. Struktur ini melihat gaya bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa.

Struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa kedalam proposisi, kalimat, atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan ke dalam bentuk yang lebih kecil.

Sedangkan struktur retorik berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu. Dengan kata lain, struktur retorik melihat pemakaian pilihan kata, idiom, grafik, gambar yang digunakan untuk memberi penekanan pada arti tertentu.

2.7 Harian Waspada dan Analisa

Merupakan media cetak yang berkembang di Sumatera Utara terutama di kota Medan. Waspada adalah sebuah harian yang terbit di Medan sejak 11 Januari 1947. Harian ini didirikan oleh Mohammad Said dan Ani Idrus. Pemimpin redaksi saat ini Prabudi Said. Waspada terletak di Jalan Letjen Suprpto/Brigjen

Katamso No 1, Medan. Dikutip dari (Wikipedia), Waspada juga hadir dalam bentuk daring *Waspadamedan.com* dengan berita yang lebih terkini serta bentuk *ePaper*.

Analisa adalah sebuah surat kabar harian yaang terbit di Medan. Surat kabar ini termasuk dalam lumut media oleh lumut *communication*. Kantor pusatnya terletak di jalan Jendral Ahmad Yani No 35-49, Kesawan, Medan. Dikutip dari (Wikipedia), Koran ini pertama kali terbit sejak tanggal 23 Maret 1972. Surat kabar ini memiliki slogan dan motto adalah Membangkitkan Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan. Surat kabar tersebut memiliki sirkulasi terbesar di Medan. Pada awalnya analisa diterbitkan seminggu sekali sebelum menjadi suratkabar harian. Salah satu fitur Analisa yang paling terkenal adalah kartun pak tuntung yang muncul di halaman lima setiap harinya. (kecuali minggu) sejak 23 maret 1973. Saat ini harian analisa dipimpin oleh pemimpin umum Supandi Kusuma dan pemimpin perusahaan Sujito Sukirman. Redaksional dipimpin oleh kawakan eks-lembaga kantor berita nasional Antara yakni pemimpin redaksi H. Soffiyan, didampingi wakil pemimpin redaksi H. Ali Soekardi dan dibantu sekretaris redaksi H. War Djamil.

BAB III

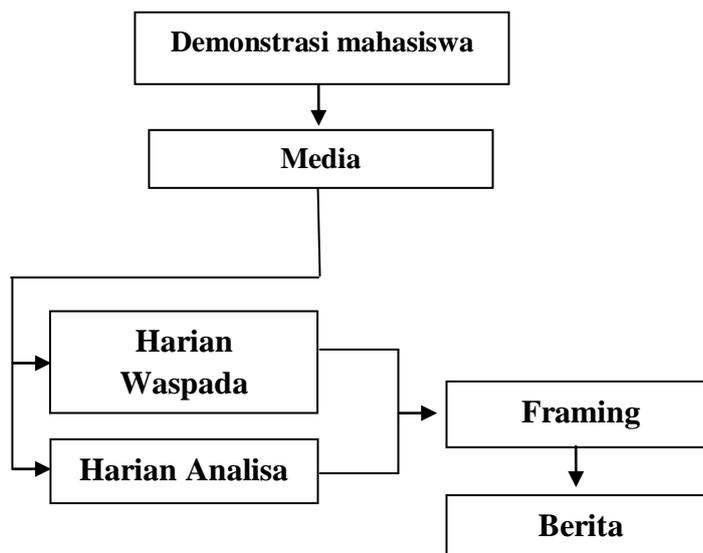
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan pendekatan ini, diharapkan penulis dapat secara mendalam dan komprehensif menggambarkan, mengklasifikasikan serta menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti menggunakan metode analisis framing Pan dan Kosicki yang akan dijabarkan di bagian teknik analisis data Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 1. Kerangka Konsep



3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya dilapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa defenisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

3.3.1 Demonstrasi mahasiswa

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut dan biasanya hal ini terjadi karena adanya pertentangan-pertentangan terhadap sistem pemerintahan yang sering disebut dengan kontroversi. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas. Sepanjang sejarah, mahasiswa di berbagai negara mengambil peran penting dalam sejarah suatu negara.

3.3.2 Media

Merupakan alat atau sarana dalam segala bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi.

3.3.3 Waspada

Merupakan media cetak yang berkembang di Sumatera Utara terutama di kota Medan. Waspada adalah sebuah harian yang terbit di Medan sejak 11

Januari 1947. Harian ini didirikan oleh Mohammad Said dan Ani Idrus. Pemimpin redaksi saat ini Prabudi Said. Waspada terletak di Jalan Letjen Suprpto/Brigjen Katamso No 1, Medan. Dikutip dari (Wikipedia), Waspada juga hadir dalam bentuk daring Waspadamedan.com dengan berita yang lebih terkini serta bentuk ePaper.

3.3.4 Analisa

Analisa adalah sebuah surat kabar harian yaang terbit di Medan. Surat kabar ini termasuk dalam lumut media oleh lumut *communication*. Kantor pusatnya terletak di jalan Jendral Ahmad Yani No 35-49, Kesawan, Medan. Dikutip dari (Wikipedia), Koran ini pertama kali terbit sejak tanggal 23 Maret 1972. Surat kabar ini memiliki slogan dan motto adalah membangkitkan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Surat kabar tersebut memiliki sirkulasi terbesar di Medan. Pada awalnya analisa diterbitkan seminggu sekali sebelum menjadi surat kabar harian. Salah satu fitur analisa yang paling terkenal adalah kartun pak tuntung yang muncul di halaman lima setiap harinya. (kecuali minggu) sejak 23 maret 1973. Saat ini harian analisa dipimpin oleh pemimpin umum Supandi Kusuma dan pemimpin perusahaan Sujito Sukirman. Redaksional dipimpin oleh kawakan eks-lembaga kantor berita nasional Antara yakni pemimpin redaksi H. Soffiyan, didampingi wakil pemimpin redaksi H. Ali Soekardi dan dibantu sekretaris redaksi H. War Djamil.

3.3.5 Analisis framing

Analisis *framing* adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis *framing* juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.

3.3.6 Berita politik

Berita politik merupakan berita yang menyangkut kegiatan politik atau peristiwa di sekitar masalah-masalah ketatanegaraan dan segala hal yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan negara. Politik di sini harus diartikan sebagai upaya manusia untuk menata kehidupan rakyat, pemerintahan dan negara demi mencapai suatu tujuan dan cita-cita bersama yang luhur, yaitu perbaikan hidup dan nasib bangsanya. (Barus, 2010:41).

3.4 Kategorisasi Penelitian

Karena penelitian ini memakai analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, maka kategorisasi dalam penelitian ini, langsung diaplikasikan dengan Kerangka Framming Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dalam kerangka itu, terlihat perangkat dan unit-unit yang diamati dalam penelitian ini, seperti tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kerangka *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Struktur	Perangkat Framing	Unit yang diamati
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun kata	1. Skema berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan berita	5W + 1H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Maksud kalimat, hubungan 5. Nominalisasi	Paragraf, Proposisi

	antarkalimat 6. Koherensi 7. Bentuk kalimat 8. Kata ganti	
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	9. Leksikon 10. Grafis 11. Metafor 12. Pengandaian	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

3.5 Informan/Narasumber

Karena ini merupakan Analisis Framing, maka informan dan narasumber yang digunakan dalam penelitian, diambil ketika peneliti merasa perlu untuk melakukan wawancara terkait dengan informan atau narasumber.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian adalah berita dalam Harian Waspada dan Analisa Medan dalam edisi yang diteliti yaitu hanya pada satu minggu di bulan September 2019, tepatnya edisi tanggal 19-26 September 2019.

Meski demikian, peneliti juga melakukan analisis dengan bantuan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Beberapa di antaranya berupa buku-buku, artikel, dan hasil-hasil penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi suatu yang dapat diolah, mengintensifkan-nya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: pengumpulan data, menganalisa data, pembersihan data. Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka *framing* Pan dan Kosicki. Model ini dibagi ke dalam empat cara (Sobur, 2001:175-176) yaitu:

1. Sintaksis (cara wartawan menyusun fakta), yaitu berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa kedalam bentuk susunan kisah berita. Dengan demikian, struktur sintaksis ini bisa diamati dari bagian berita (*headline* yang dipilih, *lead* yang dipakai, latar informasi yang dijadikan sandaran, sumber yang dikutip, dan sebagainya).
2. Skrip (cara wartawan mengisahkan fakta), yaitu melihat bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa.
3. Tematik (cara wartawan menulis fakta), yaitu berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan ke dalam bentuk yang lebih kecil.
4. Retoris (cara wartawan menekankan fakta), yaitu berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu. Dengan kata lain, struktur retoris

melihat pemakaian kata, idiom, grafik, gambar yang juga dipakai guna memberi penekanan pada arti tertentu.

Secara konkrit, maka perangkat dan unit-unit yang diamati dalam penelitian ini, dapat terlihat dalam Tabel 1. Kerangka framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, di bagian sebelumnya.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Medan untuk produk harian Waspada dan Analisa Medan terbitan bulan September 2019.

Waktu penelitian mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Framing menganalisis bagaimana media membingkai peristiwa berdasarkan kerangka *framing* milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang meneliti empat komponen yaitu, Sintaksis/skema berita, Skrip/kelengkapan berita, Tematik dan Retoris. Peristiwa yang akan dianalisis tentang demonstrasi mahasiswa terhadap berita yang diterbitkan oleh dua media. Dari analisis *framing* yang dilakukan, dapat dilihat beberapa indikator:

1. Apakah media tersebut lebih memihak terhadap pemerintahan atau masyarakat.
2. Apakah media membuat berita yang memuat kekuasaan atau melawan kekuasaan.
3. Apakah media bertindak netral menurut objektivitas jurnalistik.

Total berita dalam pemberitaan yang terkait dengan demonstrasi mahasiswa berjumlah 40 berita secara keseluruhan dalam dua media. Harian Analisa memuat berita sebanyak 17 berita dan Harian Waspada memuat berita sebanyak 23 berita di bulan September 2019. Berdasarkan peristiwa demonstrasi mahasiswa berjumlah 19 berita dalam dua media. Sedangkan berapa pastinya 20-anberita yang lain dari dua media tersebut terdata sebagai:

- (1) Berita komentar terhadap peristiwa.

- (2) Berita yang terkait secara tidak langsung dengan peristiwa demonstrasi mahasiswa.

Untuk kepentingan analisis dan disesuaikan kemampuan dari segi waktu dan tenaga, maka penulis membatasi 3 berita di masing-masing media yang terkait langsung dengan peristiwa demonstrasi mahasiswa, sebagai unit analisis.

Tabel 2. Analisis Framing Pemberitaan Harian Analisa Edisi 21 September 2019 dan Harian Waspada Edisi 20 September 2019

Struktur	Analisa		
	Unit	Strategi penulisan	Keterangan
Sintaksis Cara wartawan menyusun fakta	<i>Headline</i>	HMI Bireuen Tolak Revisi UU KPK	Judul
	<i>Lead</i>	Puluhan anggota Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bireuen melakukan aksi demo menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPRK Bireuen, Kamis (19/9).	Paragraf 1
	Latar	Para pendemo awalnya berkumpul di jalan depan Pendopo Bireuen, lalu berjalan kaki menuju kantor DPRK Bireuen. Mereka membentangkan poster berisi penolakan UU KPK yang sudah disahkan DPR RI.	Paragraf 2
	Kutipan	1. Ketua HMI cabang Bireuen, Syibrani Malasyi salah satu orator mengatakan ada sejumlah poin dalam UU baru tentang KPK yang dianggap merupakan upaya pelemahan KPK dalam melaksanakan tugasnya. 2. “Seperti pegawai KPK dari ASN, penyidik KPK dari Polri dan kejaksaan, penuntutan harus berkoordinasi dengan kejaksaan Agung, hingga mekanisme penyadapan”. Kata Syibrani serta	Paragraf 3, 4 dan 7

		<p>sejumlah poin lainnya.</p> <p>3. Rusyidi Mukhtar mengatakan, selaku pimpinan akan menampung aspirasi yang disampaikan mahasiswa kepada DPRK Bireuen dan meneruskan aspirasi yang disampaikan ke tingkat atas.</p>	
	Pernyataan	<p>1. “Makanya kami di sini menyampaikan aspirasi menolak revisi UU KPK melalui anggota DPRK Bireuen”.</p> <p>2. Zulfahmi sebagai anggota dewan mengatakan “Sebab korupsi menghambat pembangunan, tentunya kita menentang bersama segala bentuk upaya pelemahan KPK”.</p>	Paragraf 5 dan 8
	Penutup	Sekitar pukul 11.30 WIB, aksi damai HMI itu membubarkan diri.	paragraf 9
Scrip Cara wartawan mengisahkan fakta	Who	HMI Bireuen melalui Ketua HMI Syibransyah Malasyi, ketua sementara DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar, anggota dewan Zulfahmi.	Paragraf 3, 7 dan 8
	What	HMI Bireuen Tolak Revisi UU KPK	Paragraf 1
	Why	UU baru tentang KPK yang dianggap merupakan upaya pelemahan KPK.	Paragraf 3
	When	Kamis, (19/9).	Paragraf 1
	Where	Ke DPRK Bireuen.	Paragraf 1
	How	Setelah melakukan koordinasi dengan anggota dewan lainnya, Ketua Sementara DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar menandatangani petisi yang disampaikan mahasiswa.	Paragraf 9
Tematik Cara wartawan menulis fakta (paragraf proposisi, hubungan	Detail koherensi, bentuk kalimat	Para pendemo awalnya berkumpul di jalan depan Pendopo Bireuen, lalu berjalan kaki menuju kantor DPRK Bireuen. Mereka membentangkan poster berisi penolakan UU KPK yang sudah disahkan DPR RI.	Paragraf 2

antar kalimat)			
Retoris Cara wartawan menekankan fakta	Leksikon	1. Demo 2. Mustahil 3. Koordinasi 4. Petisi	Paragraf 1, 5 dan 9
	Grafis	Tampak grafis foto temui pendemo ketua sementara DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar (tengah) dan anggota dewan lainnya menemui pendemo dari HMI Bireuen, di kantor DPRK Bireuen.	
Struktur	Waspada		
	Unit	Strategi penulisan	Keterangan
Sintaksis Cara wartawan menyusun fakta	Headline	HMI Bireuen Tolak Revisi UU KPK	Judul
	Lead	Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bireuen menggelar aksi damai ke DPRK menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (19/9).	Paragraf 1
	Latar	Cabang Bireuen menggelar aksi damai ke DPRK menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.	Paragraf 1
	Kutipan	1. Koordinator aksi Sibran Malasi, dalam orasinya meminta pimpinan DPRK menandatangani srat pernyataan. 2. Anggota DPRK Zulfahmi mengatakan, pihaknya akan menampung dan melanjutkan harapan mahasiswa ke DPR RI. 3. Ketua sementara DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar mengatakan sepakat korupsi diberantas.	Paragraf 4 dan 6.
	Pernyataan	1. “Yang perlu kita garis bawahi bahwa korupsi harus diberantas, karena mengakibatkan tersendatnya kesejahteraan masyarakat dan arah	Paragraf 4 dan 6.

		<p>pembangunan untuk membangkitkan Indonesia ke arah yang lebih baik”.</p> <p>2. “DPRK Bireuen akan mengkaji dan meminta waktu sampai 27 September 2019 untuk menyampaikan aspirasi ini”.</p>	
	Penutup	Setelah ketua DPRK menyerahkan surat pernyataan kepada koordinator aksi, sekira pukul 11:30 massa membubarkan diri dengan tertib.	Paragraf 7
Skrip Cara wartawan mengisah kan fakta	Who	HMI Bireuen melalui ketua HMI Sibran Malasi, ketua sementara DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar, anggota DPRK Zulfahmi.	Paragraf 4
	What	Aksi damai ke DPRK cabang Bireuen.	Paragraf 1
	Why	Mereka menemui peserta aksi dan menandatangani surat pernyataan telah menerima aspirasi mahasiswa.	
	When	Kamis, (19/9).	Paragraf 1
	Where	Ke DPRK.	Paragraf 1
	How	Mereka menemui peserta aksi di gerbang masuk DPRK dan menandatangani surat pernyataan telah menerima aspirasi mahasiswa.	Paragraf 6
Tematik Cara wartawan menulis fakta (pragraf proposisi, hubungan antar kalimat)	Detail koherensi, bentuk kalimat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyikapi hal itu, anggota DPRK Zulfahmi mengatakan, pihaknya akan menampung dan melanjutkan harapan mahasiswa ke DPR RI . 2. Ketua sementara DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar mengatakan korupsi diberantas. 3. Selanjutnya, mereka menemui peserta aksi digerbang masuk DPRK dan menandatangani surat pernyataan telah menerima aspirasi mahasiswa. 	Paragraf 4, 5 dan 6
Retoris Cara wartawan	Leksikon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumpun 2. Eksekutif 3. Independen 4. Kolektif 	Paragraf 3, 4 dan 5

menekankan fakta	Grafis	Tampak grafis foto ketua sementara DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar menyerahkan surat pernyataan kepada koordinator aksi mahasiswa HMI Cabang Bireuen.	
------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Berita **Harian Analisa** edisi 21 September 2019, dari sudut **Sintaksis** pada bagian *headline* yang ditampilkan berita berjudul "*HMI Bireuen Tolak Revisi UU KPK*", **Harian Analisa** menyoroti situasi yang terjadi di Kantor DPRK Bireuen yang tengah melakukan aksi demo dikarenakan tolak revisi UU KPK yang sudah disahkan di DPR RI. Tolak revisi yang dimaksud mengarah kepada kontroversi antara mahasiswa dengan sistem pemerintahan.

Dari *lead* yang ditampilkan, jenis *lead* ini merupakan *name lead* karena lebih menekankan pada unsur pelaku peristiwa pada penulisan berita yaitu "Puluhan anggota HMI". Pada berita ini *lead* yang ditampilkan **Analisa** mengangkat sosok organisasi HMI yang merupakan anggota yang melakukan aksi demo.

Latar informasi yang ditampilkan **Analisa** menginformasikan awal terjadinya peristiwa demo mahasiswa yang merupakan bagian dari kelompok HMI yang telah melakukan perjalanan kaki ke kantor DPRK Bireuen.

Analisa mengambil narasumber untuk pemberitaan ini yaitu Ketua HMI cabang Bireuen, Syibransyah Malasyi, Ketua DPRK Bireuen, yaitu Rusyidi Mukhtar, dan Anggota DPRK, Zulfahmi. Artinya, **Harian Analisa** memuat narasumber yaitu seorang (1) dari mahasiswa yang sedang berdemonstrasi dan 2 (dua) orang dari anggota DPRK Bireuen.

Analisa mengambil tiga kutipan dari masing-masing narasumber, pertama Salah satu orator Syibran Malasyi mengatakan: “ada sejumlah poin dalam UU baru tentang KPK yang dianggap merupakan upaya pelemahan KPK dalam melaksanakan tugasnya”. Analisa menyorotibahwa Syibran yang bertanggung jawab menyampaikan aspirasi dalam peristiwa demonstrasi HMI. Kedua, “Seperti pegawai KPK dari ASN, penyidik KPK dari Polri dan kejaksaan, penuntutan harus berkoordinasi dengan kejaksaan Agung, hingga mekanisme penyadapan”. Kata Syibran serta sejumlah poin lainnya. Analisa menyoroti mengungkapkan Syibran bahwa kegiatan yang dikerjakan oleh orang banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu maupun pihak lainnya.

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan aksi mahasiswa Analisa menambahkan kutipan dari “Rusyidi Mukhtar mengatakan, selaku pimpinan akan menampung aspirasi yang disampaikan mahasiswa kepada DPRK Bireuen dan meneruskan aspirasi yang disampaikan ke tingkat atas”. Kutipan tersebut menandakan respon Rusyidi terhadap aksi mahasiswa. Dari kutipan tersebut Analisa menganggap bahwa Rusyidi adalah sebagai Ketua sementara DPRK yang sangat diharapkan oleh mahasiswa untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi mereka. Ketiga “Makanya kami di sini menyampaikan aspirasi menolak revisi UU KPK melalui anggota DPRK Bireuen”. Analisa menganggap Syibran mementingkan pegawai-pegawai KPK sebagai pemberantas korupsi semakin lama semakin tidak difungsikan lagi alias dibubarkan.

Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Zulfahmi sebagai anggota dewan mengatakan “Sebab korupsi menghambat pembangunan, tentunya kita menentang bersama segala bentuk upaya pelemahan KPK”. Pernyataan yang dituliskan Analisa menjelaskan bahwa Zulfahmi mendukung aspirasi mahasiswa dalam penolakan Revisi UU KPK yang dianggap selain menghambat pembangunan juga dianggap sebagai upaya fungsi pelemahan KPK.

Pada analisis **Skrip** dapat dilihat dari unsur kelengkapan berita yakni 5W+1H yaitu: (*Who*), Ketua HMI Syibrans Malasyi, ketua sementara DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar, anggota dewan Zulfahmi, (*What*) HMI Bireuen Tolak Revisi UU KPK. (*Why*), UU baru tentang KPK yang dianggap merupakan upaya pelemahan KPK. (*When*), Kamis, (19/9). (*Where*), Ke DPRK Bireue. (*How*), Setelah melakukan koordinasi dengan anggota dewan lainnya, Ketua Sementara DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar menandatangani petisi yang disampaikan mahasiswa. Analisa menonjolkan (*What*), HMI Bireuen Tolak Revisi UU KPK. Ketua HMI cabang Bireuen, Syibrans salah satu orator, mengungkapkan sejumlah poin dalam UU baru tentang KPK yang dianggap merupakan upaya pelemahan KPK dalam melaksanakan tugasnya.

Pada analisis **Tematik**, fakta yang diangkat dalam berita menonjolkan puluhan mahasiswa dari organisasi HMI melakukan perjalanan kaki untuk menyampaikan aspirasi.

Dari aspek **Retoris** Analisa memperlihatkan dari perangkat Leksikon untuk menonjolkan yakni kata Demo, Mustahil, Koordinasi dan Petisi. Kata demo diartikan unjuk rasa dari sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan

orang di hadapan umum. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Mustahil dalam berita dapat diartikan tidak mungkin. Berkoordinasi yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang dikerjakan oleh orang banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu maupun pihak lainnya. Petisi artinya pernyataan yang disampaikan kepada Pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal.

Dari unsur grafis, yaitu gambar ditemui pendemo ketua sementara DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar (tengah) dan anggota dewan lainnya menemui pendemo dari HMI Bireuen, di kantor DPRK Bireuen.

Berita **Harian Waspada** edisi 20 September 2019, dari sudut **Sintaksis** pada bagian *headline* yang ditampilkan berita berjudul “*HMI Bireuen Tolak Revisi UU KPK*”, **Harian Waspada** menyoroti situasi yang terjadi di Kantor DPRK Bireuen yang tengah melakukan aksi demo dikarenakan tolak revisi UU KPK yang sudah disahkan di DPR RI. Tolak revisi yang dimaksud mengarah kepada kontroversi antara mahasiswa dengan sistem pemerintahan.

Dari *lead* yang ditampilkan, jenis *lead* ini merupakan *name lead* karena lebih menekankan pada unsur pelaku peristiwa pada penulisan berita yaitu “Sejumlah mahasiswa tergabung dalam HMI”. Pada berita ini *lead* yang ditampilkan **Waspada** mengangkat sosok organisasi HMI yang merupakan anggota yang melakukan aksi demo.

Latar informasi yang ditampilkan Waspada menggambarkan situasi aksi damai yang tengah dilaksanakan oleh anggota HMI tanpa ada terjadinya keributan di kantor DPRK Bireuen.

Waspada mengambil narasumber untuk pemberitaan ini yaitu Koordinator aksi, Syibrans Malasyi, Ketua sementara DPRK Bireuen, yaitu Rusyidi Mukhtar, dan Anggota DPRK, Zulfahmi. Artinya, harian Waspada memuat narasumber yaitu seorang (1) dari mahasiswa yang sedang berdemonstrasi dan 2 (dua) orang dari anggota DPRK Bireuen.

Waspada memuat tiga kutipan pada masing-masing narasumber diatas, pertama “Koordinator aksi Sibran Malasi, dalam orasinya meminta pimpinan DPRK menandatangani surat pernyataan”. Waspada menyoroti salah seorang koordinator aksi damai dari HMI yang bertanggung jawab menyampaikan aspirasi mahasiswa. Kedua “Anggota DPRK Zulfahmi mengatakan, pihaknya akan menampung dan melanjutkan harapan mahasiswa ke DPR RI”. Waspada menyoroti anggota DPRK Bireuen yang mengambil alih untuk merespon para mahasiswa. Ketiga “Ketua sementara DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar mengatakan sepakat korupsi diberantas”. Waspada menyoroti ketua sementara dari DPRK Bireuen yang menyetujui dan mendukung aspirasi mahasiswa.

Untuk melengkapi berita Waspada memuat dua pernyataan, pertama “Yang perlu kita garis bawahi bahwa korupsi harus diberantas, karena mengakibatkan tersendatnya kesejahteraan masyarakat dan arah pembangunan untuk membangkitkan Indonesia ke arah yang lebih baik”, sebut Zulfahmi. Waspada menyoroti anggota DPRK yang memberikan penjelasan bahwa korupsi

membawa kesengsaraan bagi masyarakat. Kedua “DPRK Bireuen akan mengkaji dan meminta waktu sampai 27 September 2019 untuk menyampaikan aspirasi ini”, sebut Rusyidi. Waspada menyoroti ketua sementara dari DPRK Bireuen yang menerima aspirasi dan akan memberikan respon selanjutnya kepada mahasiswa dengan rentang waktu yang telah disepakati.

Pada analisis **Skrip** dapat dilihat dari unsur kelengkapan berita yakni 5W+1H yaitu: (*Who*), Koordinator aksi Syibrans Malasyi, ketua sementara DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar, anggota dewan Zulfahmi, (*What*), HMI Bireuen Tolak Revisi UU KPK. (*Why*), Mereka menemui peserta aksi dan menandatangani surat pernyataan telah menerima aspirasi mahasiswa. (*When*), Kamis, (19/9). (*Where*), Ke DPRK Bireuen, (*How*), Mereka menemui peserta aksi di gerbang masuk DPRK dan menandatangani surat pernyataan telah menerima aspirasi mahasiswa. Waspada menonjolkan (*What*), HMI Bireuen Tolak Revisi UU KPK. Menolak revisi UU KPK yang telah disepakati pada 16 September 2019 oleh DPR dan Presiden terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Pada analisis **Tematik**, fakta yang diangkat dalam berita menonjolkan pernyataan-pernyataan anggota DPRK dalam peristiwa aksi damai yang di adakan oleh sejumlah mahasiswa anggota HMI di kantor DPRK Bireuen.

Dari aspek **Retoris** Waspada memperlihatkan dari perangkat Leksikon untuk menonjolkan kata Rumpun, Eksekutif, Independen dan Kolektif. Rumpun

artinya segolongan. Eksekutif artinya kekuasaan menjalankan Undang-undang. Independen artinya tidak terikat. Kolektif artinya secara bersama.

Dari unsur grafis, yaitu ketua sementara DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar menyerahkan surat pernyataan kepada koordinator aksi mahasiswa HMI Cabang Bireuen.

Tabel 3. Analisis Framing Pemberitaan Harian Analisa dan Waspada Edisi 25 September 2019

Struktur	Analisa		
	Unit	Strategi penulisan	Keterangan
Sintaksis Cara wartawan menyusun fakta	Headline	Demo Diberbagai Kota Mahasiswa “Menang” Tuntutan Dipenuhi	Headline
	Lead	Mahasiswa menggelar demo serentak di persada Nusantara untuk menekan pemerintah dan DPR untuk menunda pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU). Demo mahasiswa berlangsung di Jakarta, Bandung, Denpasar, Medan, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Padang, Jambi, dan Kendari dan Kota lainnya.	Paragraf 1
	Latar	Demo di sejumlah kota, malah berujung bentrok mahasiswa dengan aparat keamanan. bentrok mahasiswa kontra aparat di antaranya terjadi di Jakarta, Medan, Palembang, Bandung, Jambi yang menimbulkan jatuhnya korban.	Paragraf 2
	Kutipan	DPR sudah menyahuti massa pendemo termasuk mahasiswa yakni menunda pengesahan empat RUU seperti permintaan Presiden Jokowi yaitu RKHUP, RUU pertahanan, RUU mineral dan Batubara	Paragraf 16

		(Minerba), dan RUU pemasyarakatan.	
	Pernyataan	“Saya mengimbau kepada adik-adik mahasiswa agar menurunkan tensi karena semua tuntutan sudah kita penuhi terkait RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.	Paragraf 17
	Penutup	“Banyak hal yang dipelintir lalu membuat suasana panas sehingga saya jelaskan, tidak ada hal-hal seperti itu. Namun untuk menurunkan tensi dan memenuhi aspirasi publik dan usulan Presiden maka dua RUU kami tunda”.	Paragraf 20
Skrip Cara wartawan mengisah kan fakta	Who	Ketua DPR Bambang Soesatyo	Paragraf 17
	What	Terjadinya bentrok antara mahasiswa dan aparat keamanan.	Paragraf 2
	Why	Mahasiswa kontra aparat.	Paragraf 2
	When	Pukul 16.00-22.00 WIB. Selasa, (24/9).	
	Where	Gedung DPR/MPR/DPD di Jakarta, Bandung, Denpasar, Medan, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Padang, Jambi, dan Kendari dan Kota lainnya.	
	How	Terdata, lima mahasiswa terkapar di Stasiun Palmerah, Jakarta Barat, akibat kehabisan oksigen setelah terkena asap gas air mata dan dari Palembang, dilaporkan 28 mahasiswa dilarikan ke RS Charitas karena sesak nafas setelah terkena gas air mata yang ditembakkan petugas untuk membubarkan massa.	Paragraf 7 dan 20
Tematik Cara wartawan menulis fakta (pragraf proposisi, hubungan	Detail koherensi, bentuk kalimat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demo mahasiswa di Jakarta dan Medan bahkan berlangsung hingga selasa malam. 2. Massa terus maju menuju Gedung DPR/MPR. 3. Akibat demo massa tersebut kawasan di sekitar Gerbang utama Gedung DPR/MPR rusak parah. 	Paragraf 3, 5, 10 dan 14

antar kalimat).		4. Aksi massa mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat Selasa sempat mencekam.	
Retoris Cara wartawan menekankan fakta	Leksikon	1. Bentrok 2. Massa 3. Realitas	Paragraf 12
	Grafis	Tampak grafis tidak sesuai dengan deskripsinya, <i>Water canon</i> petugas kepolisian menembak gas air mata 'water canon' kepada mahasiswa saat terjadinya kerusuhan Jalan Iman Bonjol Medan, Selasa (24/9). Demonstrasi dari sejumlah elemen mahasiswa se-kota Medan menolak UU KPK Dan pengesahan RUU KUHP berakhir dengan ricuh.	
Struktur	Waspada		
	Unit	Strategi penulisan	Keterangan
Sintaksis Cara wartawan menyusun fakta	Headline	"Kami Sudah Penuhi Tuntutan Tolong Mahasiswa Pulang"	Judul
	Lead	Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta mahasiswa pendemo berhenti melakukan aksi. Dia minta mahasiswa minta mahasiswa segera pulang ke tempatnya masing-masing.	Paragraf 1
	Latar	Bamsoet menyebut alasannya, karena tuntutan mahasiswa sudah dipenuhi oleh DPR. Yaitu, RUU KUHP sudah ditunda pengesahannya oleh DPR.	Paragraf 3
	Pernyataan	1. "Saya minta tolong kepada mahasiswa sebaiknya sudah cukup penyampaian aspirasi kepada kami, kembali ke rumah masing-masing". 2. "karena kami sudah memenuhi tuntutan dan aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa, yaitu menunda RKUHP, RUU PAS,	Paragraf 2, 4, 6 dan 9

		<p>sebagaimana yang disampaikan kepada kami DPR”.</p> <p>3. “Saya minta juga kepada mahasiswa jangan sampai terprovokasi, jangan sampai terpancing dengan hasutan-hasutan yang tidak benar”.</p> <p>4. “Bapak jangan bohong ya seperti Presiden “, ujar seorang mahasiswa kepada anggota Marinir.</p>	
	Penutup	“Bapak jangan bohong ya seperti Presiden “, ujar seorang mahasiswa kepada anggota Marinir.	Paragraf 9
Scrip Cara wawancara mengisahkan fakta	Who	Ketua DPR Bambang Saesatiyo, mahasiswa.	Paragraf 1 dan 9
	What	Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta mahasiswa pendemo berhenti melakukan aksi.	Paragraf 1
	Why	Bamsuet menyebut alasannya, karena tuntutan mahasiswa sudah dipenuhi oleh DPR.	Paragraf 3
	When	Selasa, (24/9).	Paragraf 2
	Where	Gedung DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.	Paragraf 2
	How	Dalam dialog itu, mahasiswa meminta Marinir menjamin keamanan mereka untuk kembali mendatangi Gedung DPR dengan aman.	Paragraf 9
Tematik Cara wawancara menulis fakta (paragraf proposisi, hubungan antar kalimat).	Detail koherensi, bentuk kalimat	Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta mahasiswa pendemo berhenti melakukan aksi. Dia minta mahasiswa minta mahasiswa segera pualang ke tempatnya masing-masing.	Paragraf 1
Retoris	Leksikon	1. Politikus	Paragraf 2,

Cara wartawan menekankan fakta		2. Terprovokasi 3. Marinir	5 dan 7
	Grafis	Tampak grafis foto mahasiswa dari berbagai elemen melakukan unjuk rasa di depan Gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). Mahasiswa menolak RUU KPK dan pengesahan RKUHP.	

Berita **Harian Analisa** edisi 25 September 2019, dari sudut **Sintaksis** pada bagian *headline* yang ditampilkan berita berjudul “Demo Diberbagai Kota Mahasiswa “Menang” Tuntutan Dipenuhi”. **Harian Analisa** menyoroti peristiwa demo serentak di persada nusantara untuk menekan pemerintah dan DPR menunda pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Mahasiswa di di penjurut tanah air ikut serta berpartisipasi menyampaikan aspirasi terkait RUU KUHP. Akhirnya tuntutan mahasiswa mendapatkan respon dari anggota DPR dan Pemerintah yaitu penundaan RUU KUHP yang menjadi kontroversial.

Dari *lead* yang ditampilkan, jenis *lead* ini merupakan *name lead* karena lebih menekankan pada unsur pelaku peristiwa pada penulisan berita yaitu “Mahasiswa menggelar aksi demo serentak”. Pada berita ini *lead* yang ditampilkan **Analisa** menggambarkan mahasiswa memiliki peran penting dalam menyampaikan hak masyarakat terkait penolakan RUU KUHP.

Latar informasi yang ditampilkan **Analisa** menginformasikan massa yang berdemonstrasi berunjuk bantrok karena kontra dengan aparat keamanan. **Analisa** menyoroti situasi mahasiswa yang berdemonstrasi mengakibatkan banyak korban jiwa yang masuk rumah sakit karena tembakan gas air mata.

Analisa mengambil narasumber untuk pemberitaan ini yaitu Ketua DPR Bambang Soesatyo. Artinya, Harian Analisa memuat narasumber yaitu seorang (1) dari anggota DPR.

Analisa memuat satu kutipan dari narasumber dalam berita yaitu, ketua DPR Bambang Soesatiyo mengatakan, DPR sudah menyahtuti massa pendemo termasuk mahasiswa yakni menunda pengesahan empat RUU seperti permintaan Presiden Jokowi yaitu RKHUP, RUU pertahanan, RUU mineral dan Batubara (Minerba), dan RUU pemasyarakatan. Analisa menyoroti seorang anggota DPR yang sudah memenuhi aspirasi mahasiswa terkait beberapa poin RKUHP.

Untuk melengkapi berita Analisa menambahkan satu pernyataan dari anggota DPR, “Saya mengimbau kepada adik-adik mahasiswa agar menurunkan tensi karena semua tuntutan sudah kita penuhi terkait RKUHP dan RUU Pemasyarakatan”. Analisa menyoroti seorang anggota DPR yang memberikan arahan kepada massa dan berusaha menenangkan situasi yang memanas.

Pada analisis **Skrip** dapat dilihat dari unsur kelengkapan berita yakni 5W+1H yaitu: (*Who*), Ketua DPR Bambang Soesatyo. (*What*), Terjadinya bentrok antara mahasiswa dan aparat keamanan. (*Why*), Mahasiswa kontra aparat. (*When*), Pukul 16.00-22.00 WIB. Selasa, (24/9). (*Where*), Gedung DPR/MPR/DPD di Jakarta, Bandung, Denpasar, Medan, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Padang, Jambi, dan Kendari dan Kota lainnya. (*How*), Terdata, lima mahasiswa terkapar di Stasiun Palmerah, Jakarta Barat, akibat kehabisan oksigen setelah terkena asap gas air mata dan dari Palembang, dilaporkan 28 mahasiswa dilarikan ke RS Charitas karena sesak nafas setelah terkena gas air mata yang ditembakkan

petugas untuk membubarkan massa. Analisa menonjolkan (*What*) dalam berita, Terjadinya bentrok antara mahasiswa dan aparat keamanan. Analisa menyoroti setelah terjadinya bentrok antara mahasiswa dan aparat keamanan, barulah aspirasi mahasiswa mendapatkan penanganan dari anggota DPR.

Pada analisis **Tematik**, fakta yang diangkat Analisa dalam berita menonjolkan mahasiswa “Menang” yang berarti karena semua tuntutan sudah kita penuhi terkait RKUHP dan RUU Pemasarakatan”. Analisa menyoroti seorang anggota DPR yang memberikan arahan kepada massa dan berusaha menenangkan situasi yang memanas. Banyak bentrokan yang terjadi pada saat demonstrasi dan juga banyak memakan korban baik dari pihak pendemo maupun dari pihak aparat.

Dari aspek **Retoris** Analisa memperlihatkan dari perangkat Leksikon untuk menonjolkan kata Bentrok, Massa dan Realitas. Bentrok artinya berlawanan. Massa artinya masyarakat yang luas. Realitas artinya hal yang nyata.

Dari unsur grafis, yaitu gambar tidak sesuai dengan deskripsinya karena Analisa menampilkan gambar yang tidak terlihat bahwa massa mahasiswa melakukan kericuhan pada saat demonstrasi, yang terlihat hanya aparat sekelompok aparat kepolisian yang menembakkan gas air mata. *Water canon* petugas kepolisian menembak gas air mata ‘water canon’ kepada mahasiswa saat terjadinya kerusuhan Jalan Iman Bonjol Medan, Selasa (24/9). Demonstrasi dari sejumlah elemen mahasiswa se-kota Medan menolak UU KPK Dan pengesahan RUU KUHP berakhir dengan ricuh.

Berita **Harian Waspada** edisi 25 September 2019, dari sudut **Sintaksis** pada bagian *headline* yang ditampilkan berita berjudul “Kami Sudah Penuhi Tuntutan Tolong Mahasiswa Pulang”. Waspada menyoroti anggota DPR yang tengah memberikan instruksi agar para mahasiswa pulang kerumah masing-masing karena tuntutan mahasiswa sudah dipenuhi anggota DPR.

Dari *lead* yang ditampilkan, jenis *lead* ini merupakan *name lead* karena lebih menekankan pada unsur pelaku peristiwa pada penulisan berita yaitu “Ketua DPR Bambang Soesatyo”. Waspada menyoroti seorang anggota DPR yang menjelaskan bahwa tuntutan para mahasiswa sudah dipenuhi oleh DPR. Dengan harapan DPR agar mahasiswa jangan sampai terprovokasi dan terpancing emosi dengan hasutan-hasutan yang tidak benar.

Latar informasi yang ditampilkan Waspada menginformasikan Bamsuet menyebut alasannya, karena tuntutan mahasiswa sudah dipenuhi oleh DPR. Yaitu, RUU KUHP sudah ditunda pengesahannya oleh DPR. Waspada menyoroti Bamsuet yang menjelaskan dan memberikan alasan bahwa tuntutan para mahasiswa sudah diterima oleh DPR.

Waspada mengambil narasumber untuk pemberitaan ini yaitu Ketua DPR Bambang Soesatyo politikus Golkar dan salah satu mahasiswa demo. Artinya, harian Waspada memuat narasumber yaitu seorang (1) dari anggota DPR dan seorang (1) dari mahasiswa pendemo.

Untuk melengkapi berita Waspada memuat empat pernyataan dari narasumber di atas. Pertama, “Saya minta tolong kepada mahasiswa sebaiknya sudah cukup penyampaian aspirasi kepada kami, kembali ke rumah masing-

masing”. Ujar politikus disapa Bamsuet itu di kompleks parlemen, senayan, Jakarta Pusat. Waspada menyoroti seorang anggota DPR yang menegaskan kepada mahasiswa untuk berhenti menyampaikan aspirasi karena tuntutan sudah diterima oleh DPR. Dilanjutkan pernyataan Kedua, “karena kami sudah memenuhi tuntutan dan aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa, yaitu menunda RKUHP, RUU PAS, sebagaimana yang disampaikan kepada kami DPR”, Kata Bamsuet. Dilanjutkan pernyataan Ketiga, “Saya minta juga kepada mahasiswa jangan sampai terprovokasi, jangan sampai terpancing dengan hasutan-hasutan yang tidak benar”. Kata politikus Golkar itu”. Keempat, “Bapak jangan bohong ya seperti Presiden, “ujar seorang mahasiswa kepada anggota Mariner. Waspada menyoroti seorang mahasiswa yang tengah berdialog dengan anggota Mariner. Harapan mahasiswa anggota Mariner menjamin keselamatan mereka untuk kembali mendatangi Gedung DPR dengan aman.

Pada analisis **Skrip** dapat dilihat dari unsur kelengkapan berita yakni 5W+1H yaitu: (*Who*), Ketua DPR Bambang Soesatyo Politikus Golkar dan mahasiswa. (*What*), Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta mahasiswa pendemo berhenti melakukan aksi. (*Why*), Bamsuet menyebut alasannya, karena tuntutan mahasiswa sudah dipenuhi oleh DPR. (*When*) Selasa, (24/9). (*Where*), Gedung DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. (*How*), Pantauan CNNIndonesia.com, Selasa, (24/9) pukul. 20.38 WIB, di bawah Flyover JCC. Senayan, anggota Mariner itu menemui mahasiswa untuk berdialog. Dalam dialog itu, mahasiswa meminta Mariner menjamin keamanan mereka untuk kembali mendatangi Gedung DPR dengan aman. Waspada menonjolkan (*Who*), dalam

berita, seorang anggota DPR menghimbau kepada mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai macam hasutan yang bertanggung jawab.

Pada analisis **Tematik**, fakta yang diangkat Waspada dalam berita menonjolkan pernyataan-pernyataan dari narasumber. Anggota DPR menghimbau agar mahasiswa berhenti melakukan aksi dan pulang ke rumah masing-masing.

Dari aspek **Retoris** Waspada memperlihatkan dari perangkat Leksikon untuk menonjolkan kata Politikus, Terprovokasi dan Marinir. Politikus artinya orang yang berkecimpung dalam bidang politik. Terprovokasi artinya terpancing emosi untuk melakukan perbuatan negatif. Marinir artinya salah satu Komando Utama Operasi TNI dibawah kendali langsung Panglima TNI yang juga merangkap dan berfungsi sebagai Komando Utama Pembinaan pada Markas Besar TNI Angkatan Laut.

Dari unsur grafis, yaitu mahasiswa dari berbagai elemen melakukan unjuk rasa di depan Gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). Mahasiswa menolak RUU KPK dan pengesahan RKUHP.

Tabel 4. Analisis Framing Pemberitaan Harian Analisa dan Waspada Edisi 26 September 2019

Struktur	Analisa		
	Unit	Strategi penulisan	Keterangan
Sintaksis Cara wartawan menyusun fakta	Headline	Mahasiswa UIN Ar-Raniry Tolak UU KPK	Headline
	Lead	Ratusan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh menggelar aksi menolak Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di Gedung Dewan Perwakilan	Lead

		Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (25/9). Para mahasiswa masuk menduduki dan memenuhi ruang sidang paripurna dewan, setelah dizinkan masuk.	
	Latar	Ratusan mahasiswa masuk ke ruang sidang paripurna DPRA, saat melakukan aksi demo menolak UU KPK dan pasal kontroversial dalam RUU KUHP.	
	Kutipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator aksi, Reza Hendra Putra mengatakan, pihaknya membawa petisi dengan empat isi tuntutan. 2. Anggota DPR Aceh dari Partai Aceh lainnya Tarmizi, mengatakan dirinya akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan para mahasiswa. 3. “Surat (petisi) itu akan kita teruskan. Jadi sesuai permintaan mereka akan kita teruskan nanti”, Kata Sulaiman melalui sambungan telepon. 	Paragraf 7, 10 dan 12
	Pernyataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Kita juga meminta kepada DPR RI untuk mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik dalam proses RUU KUHP”. 2. “Hidup mahasiswa! Tolak pembungkaman demokrasi!”. 3. “Saya sangat mendukung apa yang disampaikan mahasiswa yang bersifat kepentingan masyarakat. Mahasiswa punya hak”. 	Paragraf 8, 9 dan 10
	Penutup	Para mahasiswa menegaskan, bila semua tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan bermalam di gedung dewan itu.	Paragraf 13
Skrip Cara wartawan	Who	Koordinator Aksi Reza Hendra Putra, Anggota DPRA Azhari Cage, Tarmizi, Sulaiman.	

mengisahkan fakta	What	Masuk ke ruang sidang paripurna.	
	Why	Mahasiswa meminta Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembatalan UU KPK, serta menolak segala bentuk pelemahan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.	Paragraf 6
	When	Pukul. 15.50 WIB. Rabu, (25/9)	
	Where	Gedung DPRA	Paragraf 4
	How	Para mahasiswa memberi waktu 7 hari dihitung dari tanggal 25 September 2019 sampai sampai 1 Oktober 2019, DPR harus menyerahkan petisi tersebut kepada DPR RI.	Paragraf 8
Tematik Cara wartawan menulis fakta (paragraf proposisi, hubungan antar kalimat).	Detail koherensi, bentuk kalimat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di ruang ini, Para mahasiswa meminta DPRA melakukan penolakan UU dimaksud. 2. Di ruang sidang, para mahasiswa ini sudah ditunggu Wakil Ketua DPRA T Irwan Djohan, anggota DPRA Azhari Cage, Tarmizi dan Asrizal Asnawi. 3. Para mahasiswa memberi waktu 7 hari dihitung dari tanggal 25 September 2019 sampai sampai 1 Oktober 2019, DPR harus menyerahkan petisi tersebut kepada DPR RI. 4. Para mahasiswa kemudian menyerahkan petisi ke DPR Aceh. 5. Selanjutnya, para mahasiswa berbicara dengan Ketua DPRA Sulaiman melalui sambungan telepon yang difasilitasi seorang anggota DPRA dan diperdengarkan kepada para mahasiswa. 6. Para mahasiswa masih bertahan hingga menjelang magrib. 	Paragraf 1, 5, 8, 11, 12 dan 13
Retoris Cara	Leksikon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negosiasi 2. Transparansi 3. Pembungkaman 	Paragraf 4, 8 dan 9

wartawan menekankan fakta	Grafis	Tampak grafis foto masuk ruang sidang, Ratusan mahasiswa masuk ke ruang sidang paripurna DPRA, saat melakukan aksi demo menolak UU KPK dan pasal kontroversial dalam RUU KUHP.	
Struktur	Waspada		
	Unit	Strategi penulisan	Keterangan
Sintaksis Cara wartawan menyusun fakta	Headline	Ratusan Mahasiswa UIN Duduki Ruang Paripurna DPRA	Judul
	Lead	Ratusan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menggelar aksi menolak RUU KUHP dan pembatalan UU KPK. Aksi ini berlangsung dikantor DPRA, Rabu (25/9) sore.	Paragraf 1
	Latar	Mahasiswa memberikan petisi kepada DPRA yang harus ditandatangani.	Paragraf 2
	Kutipan	1. “Dewan Penipu Rakyat, Jangan Kebiri KPK”. 2. “Cukup Skripsi Yang Direvisi, UU KPK Tidak Perlu, Dan DPR Entah Apa Yang Dipikirkan”.	Paragraf 12 dan 13
	Pernyataan	Koordinator aksi, Reza Hendra Putra mengatakan, revisi UU KPK akan melemahkan kinerja KPK untuk memberantas korupsi di Tanah Air.	Paragraf 14
	Penutup	“Kita meminta pemerintah untuk mengeluarkan PERPPU pembahasan UU KPK serta menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia”.	Paragraf 15
Skrip Cara wartawan mengisahkan fakta	Who	Koordinator Aksi Reza Hendra Putra, T Irwan Djohan sebagai anggota DPRA, Tarmizi Panyang.	Paragraf 14 dan 8
	What	Mahasiswa duduki Ruang Paripurna.	Paragraf 9
	Why	Menggelar aksi menolak RUU KUHP dan pembatalan UU KPK.	Paragraf 1

	When	Rabu (25/9) sore.	Paragraf 1
	Where	Dikantor DPRA.	Paragraf 1
	How	<p>Massa demonstrasi mahasiswa berkumpul di depan kantor DPRA. Mahasiswa memberikan petisi kepada DPRA untuk ditandatangani. Dalam kurun waktu seminggu mahasiswa mahasiswa akan meminta kembali petisi tersebut. Dan apabila tidak terlaksananya maka DPRA harus mengundurkan diri tulis mahasiswa terhadap petisi tersebut. Kemudian mahasiswa masuk ke Ruang Paripurna setelah dipersilahkan masuk oleh oleh DPRA untuk mendengar dan membahas orasi mahasiswa. Aksi penolakan RUU KUHP dan UU KPK tersebut berlangsung aman dan damai tanpa adanya kericuhan maupun bentrokan.</p>	
<p>Tematik Cara wartawan menulis fakta (paragraf proposisi, hubungan antar kalimat)</p>	<p>Detail koherensi, bentuk kalimat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aksi ini berlangsung di kantor DPRA. 2. Mahasiswa memberikan petisi kepada DPRA yang harus ditandatangani. 3. DPRA harus menyerahkan petisi ini kepada DPR RI, apabila tidak dilaksanakan maka DPRA harus mengundurkan diri, tulis mahasiswa dalam surat petisi tersebut. 4. Aksi tersebut langsung diterima Wakil Ketua DPRA T Irawan Djohan dan Tarmizi Payang, dengan caranya sendiri anggota DPRA mendinginkan ratusan mahasiswa tersebut. 5. T Irwan Djohan sebagai anggota DPRA yang juga pimpinan DPRA dan anggota DPRA lainnya tidak duduk di kursi melainkan duduk lesehan di lantai 	<p>Paragraf 1, 2, 3, 8, 9 dan 10</p>

		bersama mahasiswa. 6. Meski demikian ratusan personil keamanan telah disiagakan lengkap dengan peralatan anti huru haranya dan mobil water canon juga telah parkir di halaman kantor DPRA.	
Retoris Cara wartawan menekankan fakta	Leksikon	1. Petisi 2. Lesehan 3. Personil 4. Kebiri 5. Satire	Paragraf 2, 9, 10, 11 dan 12
	Grafis	Tampak grafis foto Ratusan mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh saat menggelar aksi menolak RUU KUHP dan pembatalan UU KPK di kantor DPRA.	

Berita **Harian Analisa** edisi 26 September 2019, dari sudut **Sintaksis** pada bagian *headline* yang ditampilkan berita berjudul “Mahasiswa UIN Ar-Raniry Tolak UU KPK”. Analisa menyoroti situasi ratusan mahasiswa di ruang Paripurna DPRA. Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh menggelar aksi menolak UU KPK dan sejumlah RUU KUHP yang menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

Dari *lead* yang ditampilkan, jenis *lead* ini merupakan *name lead* karena lebih menekankan pada unsur pelaku peristiwa pada penulisan berita yaitu “Ratusan Mahasiswa UIN”. Analisa menyoroti ratusan mahasiswa pendemo dari UIN Ar-Raniry. Para mahasiswa duduk lesehan di lantai ruang Paripurna setelah diizinkan masuk.

Latar informasi yang ditampilkan Analisa menginformasikan Ratusan mahasiswa masuk ke ruang sidang paripurna DPRA, saat melakukan aksi demo menolak UU KPK dan pasal kontroversial dalam RUU KUHP.

Analisa mengambil narasumber untuk pemberitaan ini yaitu, Koordinator Aksi Reza Hendra Putra, Anggota DPRA Azhari Cage, Tarmizi, Sulaiman. Artinya Analisa memuat narasumber yaitu, seorang(1) dari mahasiswa yang melakukan aksi dan tiga(3) orang dari anggota DPR.

Analisa memuat tiga kutipan dari narasumber diatas yaitu, pertama Koordinator aksi, Reza Hendra Putra mengatakan, pihaknya membawa petisi dengan empat isi tuntutan. Analisa menyoroti seorang koordinator aksi mahasiswa menyerahkan surat pernyataan kepada anggota DPR agar disampaikan kepada DPR RI, untuk mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik dalam proses RUU KUHP. Kedua, Anggota DPR Aceh dari Partai Aceh lainnya Tarmizi, mengatakan dirinya akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan para mahasiswa. Analisa menyoroti anggota DPR Tarmizi turut mendukung aspirasi para mahasiswa. Ketiga, kutipan dilanjutkan oleh tanggapan Ketua DPR yaitu: “Surat (petisi) itu akan kita teruskan. Jadi sesuai permintaan mereka akan kita teruskan nanti”, Kata Sulaiman melalui sambungan telepon. Analisa menyoroti Ketua DPR yang berbicara kepada mahasiswa melalui sambungan telepon karena posisi ketua DPR sedang berada diluar kota.

Untuk menambahkan penjelasan Analisa memuat tiga pernyataan dalam berita yaitu, Pertama, “Kita juga meminta kepada DPR RI untuk mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik dalam proses RUU KUHP”.

Kedua, dilanjutkan pernyataan dari anggota DPR yang memberi dukungan dan menyerukan, “Hidup mahasiswa! Tolak pembungkaman demokrasi!”. Ketiga, dilanjutkan pernyataan dari anggota DPR lainnya “Saya sangat mendukung apa yang disampaikan mahasiswa yang bersifat kepentingan masyarakat. Mahasiswa punya hak”.

Pada analisis **Skrip** dapat dilihat dari unsur kelengkapan berita yakni 5W+1H yaitu: (*Who*), Koordinator Aksi Reza Hendra Putra, Anggota DPRA Azhari Cage, Tarmizi, Sulaiman. (*What*), Masuk ke ruang sidang paripurna. (*Why*), Mahasiswa meminta Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembatalan UU KPK, serta menolak segala bentuk pelemahan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. (*When*), Pukul. 15.50 WIB. Rabu, (25/9). (*Where*), Gedung DPRA. (*How*), Para mahasiswa memberi waktu 7 hari terhitung dari tanggal 25 September 2019 sampai sampai 1 Oktober 2019, DPR harus menyerahkan petisi tersebut kepada DPR RI. Analisa menonjolkan unsur (*Who*) dalam berita yaitu, para mahasiswa melakukan aksi mulai dari siang sampai sore hari bahkan sampai menjelang magrib aksi masih bertahan, dengan harapan tuntutan mereka dapat dipenuhi walaupun harus menginap di Gedung dewan.

Pada analisis **Tematik**, fakta yang diangkat Analisa dalam berita menonjolkan proses berlangsungnya aksi mahasiswa. Awalnya ratusan mahasiswa berorasi didepan Gedung DPRA, habis Asyar setelah menunggu lama mahasiswa masuk ke ruang DPRA. Koordinator aksi memberi petisi kepada DPRA, dalam

jangka waktu yang telah ditentukan oleh mahasiswa DPRA harus menyerahkan Petisi tersebut kepada DPR RI.

Dari aspek **Retoris** Analisa memperlihatkan dari perangkat Leksikon untuk menonjolkan kata Negosiasi, Transparansi dan Pembungkaman. Negosiasi artinya penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Transparansi artinya keterbukaan terhadap perihal. Pembungkaman artinya tidak bersuara.

Dari unsur grafis, yaitu masuk ruang sidang, Ratusan mahasiswa masuk ke ruang sidang paripurna DPRA, saat melakukan aksi demo menolak UU KPK dan pasal kontroversial dalam RUU KUHP.

Berita **Harian Waspada** edisi 26 September 2019, dari sudut **Sintaksis** pada bagian *headline* yang ditampilkan berita berjudul “Ratusan Mahasiswa UIN Duduki Ruang Paripurna DPRA”. Waspada menyoroti kejadian ratusan mahasiswa saat melakukan aksi di depan Kantor DPRA. Situasi mahasiswa saat melakukan aksi semakin menggebu di depan kantor DPRA.

Dari *lead* yang ditampilkan, jenis *lead* ini merupakan *name lead* karena lebih menekankan pada unsur pelaku peristiwa pada penulisan berita yaitu, “Ratusan Mahasiswa UIN”. Waspada menyoroti mahasiswa UIN Ar-Raniry menggelar aksi menolak RUU KUHP dan pembatalan UU KPK yang dianggap tidak mementingkan kepentingan masyarakat.

Latar informasi yang ditampilkan Waspada menginformasikan, bahwa mahasiswa telah memberikan petisi kepada DPRA yang harus ditandatangani.

Dalam petisi tersebut mahasiswa menindak tegasi DPRA harus menyerahkan petisi kepada DPR RI, apabila tidak maka DPRA harus mengundurkan diri.

Waspada mengambil narasumber untuk pemberitaan ini yaitu, Koordinator Aksi Reza Hendra Putra, T Irwan Djohan sebagai anggota DPRA. Artinya Waspada memuat narasumber yaitu, seorang(1) dari mahasiswa yang melakukan aksi dan seorang(1) dari anggota DPR.

Waspada memuat dua kutipan dari narasumber diatas yaitu, “Dewan Penipu Rakyat, Jangan Kebiri KPK”. Waspada menyoroti tulisan dalam poster yang dibawa oleh massa demonstrasi. Mahasiswa menganggap kini anggota legislatif bukan lagi dewan perwakilan rakyat akan tetapi sebaliknya. Mahasiswa menganggap revisi UU KPK adalah bukan hanya pelemahan kinerja KPK bahkan menjadi upaya untuk menghilangkan kinerja KPK untuk memberantas korupsi di Tanah Air. Selanjutnya Waspada menyoroti tulisan lainnya, “Cukup Skripsi Yang Direvisi, UU KPK Tidak Perlu, Dan DPR Entah Apa Yang Dipikirkan”.

Untuk menambahkan penjelasan Waspada memuat satu pernyataan dalam berita yaitu, Koordinator aksi, Reza Hendra Putra mengatakan, revisi UU KPK akan melemahkan kinerja KPK untuk memberantas korupsi di Tanah Air. Waspada menyoroti seorang koordinator aksi demonstrasi, menyatakan bahwa segala bentuk pelemahan KPK justru akan memberikan peluang besar para korupsi.

Pada analisis **Skrip** dapat dilihat dari unsur kelengkapan berita yakni 5W+1H yaitu: (*Who*), Koordinator Aksi Reza Hendra Putra dan T Irwan Djohan sebagai anggota DPRA. (*What*), Mahasiswa duduki Ruang Paripurna. (*Why*),

Menggelar aksi menolak RUU KUHP dan pembatalan UU KPK. (*When*), Rabu (25/9) sore. (*Where*), Dikantor DPRA. (*How*), Massa demonstrasi mahasiswa berkumpul di depan kantor DPRA. Mahasiswa memberikan petisi kepada DPRA untuk ditandatangani. Dalam kurun waktu seminggu mahasiswa mahasiswa akan meminta kembali petisi tersebut. Dan apabila tidak terlaksananya maka DPRA harus mengundurkan diri tulis mahasiswa terhadap petisi tersebut. Kemudian mahasiswa masuk ke Ruang Paripurna setelah dipersilahkan masuk oleh DPRA untuk mendengar dan membahas orasi mahasiswa. Aksi penolakan RUU KUHP dan UU KPK tersebut berlangsung aman dan damai tanpa adanya kericuhan maupun bentrokan. Waspada unsur (*what*) dalam berita yaitu, proses memberikan petisi kepada anggota DPRA yang berjalan dengan lancar dan aman tanpa adanya kericuhan saat aksi demonstrasi terjadi.

Pada analisis **Tematik**, fakta yang diangkat Waspada dalam berita menonjolkan mahasiswa dipersilahkan masuk ke ruang Paripurna. Kemudian anggota DPRA duduk di lesehan bersama dengan mahasiswa. Artinya Waspada menggambarkan kerendahan hati Anggota DPRA. Aparat keamanan tetap disiagakan lengkap dengan peralatan anti huru haranya dan mobil canon. Artinya Waspada menggambarkan aparat waspadai kemungkinan terjadinya kericuhan saat peristiwa berlangsung.

Dari aspek **Retoris** Waspada memperlihatkan dari perangkat Leksikon untuk menonjolkan kata Petisi, Lesehan, Personil, Kebiri dan Satire. Petisi artinya pernyataan yang disampaikan kepada Pemerintah untuk meminta agar Pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal. Lesehan artinya duduk dilantai untuk

suatu pertemuan. Personil artinya anggota. Kebiri artinya dihilangkan. Satire artinya gaya bahasa yang dipakai dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran.

Dari unsur grafis, yaitu Ratusan mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh saat menggelar aksi menolak RUU KUHP dan pembatalan UU KPK di kantor DPRA.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis Peneliti pada pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa Tentang Penolakan RUU KUHP pada surat kabar Harian Analisa dan Harian Waspada, edisi 19 September - 26 September 2019, peneliti menemukan arah *frame* yang berbeda antara kedua media tersebut. Objek kajian terdiri dari 6 berita, yakni 3 berita dari surat kabar Harian Analisa dan 3 berita dari surat kabar Harian Waspada yang berkaitan langsung dengan peristiwa demonstrasi mahasiswa. Dari hasil penelitian Penulis, Analisa dan Waspada memiliki cara yang berbeda dalam mengemas berita Demonstrasi Mahasiswa. Berikut ini adalah penjelasan mengenai bagaimana media membingkai peristiwa dalam masing-masing berita yaitu:

Tabel 5. Resume Unit Analisis Berita Harian Analisa

No.	Berita Harian Analisa	Resume
1.	“HMI Bireuen Tolak Revisi UU KPK” Edisi Sabtu, 21 September 2019	Harian Analisa menganggap berita “HMI Bireuen Tolak Revisi UU KPK” adalah berita penting, karena pemberitaan ini merupakan peristiwa besar yang terjadi di Tanah Air dan harus diungkapkan kebenarannya. Dalam pemberitaan demonstrasi mahasiswa tentang Penolakan RUU KUHP di kabupaten Bireuen, Analisa banyak memuat

		<p>pandangan narasumber terhadap kasus tersebut. Analisa menonjolkan isi pemberitaan terhadap mahasiswa demonstrasi daripada DPRK. Pada isi teks berita, Analisa menyajikan secara singkat dan tegas, Analisa menggunakan unsur grafis untuk memperkuat isi berita tentang peristiwademonstrasi mahasiswa saat menemui anggota DPRK Bireuen.</p>
2.	<p>“Mahasiswa Menang Tuntutan Dipenuhi” Edisi Rabu, 25 September 2019</p>	<p>Pada pemberitaan “Mahasiswa Menang Tuntutan Dipenuhi”. Harian Analisa menganggap berita ini, sangat penting yang harus diungkapkan kebenarannya. banyak terjadi bentrok antara mahasiswa yang berdemonstrasi dengan aparat kepolisian sehingga memakan korban. Mengungkapkan kebenaran aksi berakhir ricuh. Analisa banyak memberi pandangannya terhadap kasus. Analisa banyak menonjolkan isi berita. Dalam menyampaikan isi berita Analisa menggunakan bahasa yang sederhana untuk mudah dipahami pembaca. Analisa menggunakan unsur grafis yang sangat jelas memperlihatkan polisi mengamankan pendemo dengan menembakkan gas air mata kepada mahasiswa saat terjadi kericuhan.</p>
3.	<p>“Mahasiswa UIN Ar – Raniry Tolak UU KPK” Edisi Kamis, 26 September 2019</p>	<p>Dalam pemberitaan “Mahasiswa UIN Ar – Raniry Tolak UU KPK”. Analisa memuat berita dengan menonjolkan pernyataan DPRA yang mendukung aksi demonstrasi mahasiswa. Analisa tegas dan lugas dalam menyampaikan isi berita. Analisa melengkapi berita dengan menambahkan keterangan waktu saat peristiwa terjadi secara detail. Analisa memuat narasumber lebih banyak dari anggota DPR daripada narasumber dari mahasiswa pendemo. Analisa Menekankan fakta-fakta yang terjadi dalam peristiwa. Analisa menyusun isi berita menggunakan kalimat yang saling berhubungan antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Analisa menggunakan unsur grafis kurang jelas</p>

		gambar yang diperlihatkan tidak sesuai dengan isi berita, karena isi berita adalah kericuhan mahasiswa demonstrasi sedangkan gambar yang diperlihatkan adalah pihak aparat kepolisian yang menembakkan gas air mata kearah mahasiswa sehingga tidak terlihat jelas kericuhan yang terjadi saat demonstrasi berlangsung.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari penjelasan Analisa mengenai pemberitaan demonstrasi mahasiswa dapat disimpulkan bahwa surat kabar ini cukup intens dalam menyampaikan pemberitaan mengenai demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU KUHP. Harian Analisa membingkai peristiwa dengan mengambil narasumber lebih dominan dari anggota legislatif daripada anggota mahasiswa pendemo. Menurut Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang ada di dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/Sk-Dp/Iii/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, disebutkan Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Pasal 1 KEWI berbunyi: “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Berimbang artinya semua pihak mendapat kesempatan setara.” Seharusnya, apabila Harian Analisa mengambil satu narasumber dari mahasiswa pendemo maka Harian Analisa harus mengambil satu narasumber juga dari anggota legislatif.

Analisa cukup kritis dalam menyampaikan berita, hal ini terlihat dari informasi fakta yang disampaikan secara jelas seperti penulisan nama yang

terlibat dalam peristiwa, jumlah korban bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian dan fasilitas negara yang rusak akibat terjadinya bentrok dalam peristiwa demonstrasi mahasiswa. Lokasi demonstrasi mahasiswa dilakukan di berbagai kota di tanah air Indonesia. Harian Analisa membingkai peristiwa secara keseluruhan dan memuat pemberitaan peristiwa Demonstrasi Mahasiswa dalam satu berita *headline*. Harian Analisa sangat menyoroti bentrok yang dilakukan mahasiswa pada saat Demonstrasi dan menyoroti bagaimana tanggapan pemerintah terhadap mahasiswa. Sehingga terlihat bahwa arah pemberitaan Analisa mengarah kepada masalah kekuasaan, seperti kekuasaan terhadap diri setiap masyarakat dan kekuasaan antara pemerintah dengan masyarakat serta hak asasi manusia digunakan sebagai alat untuk membuat penolakan terhadap RKUHP. Maka dapat diketahui bahwa *frame* yang digunakan oleh Analisa yakni *frame* di bidang hukum dan sosial politik. Karena terlihat dari peristiwa yang dikumpulkan oleh Harian Analisa, wartawan Harian Analisa sangat menyoroti tindakan anggota DPR, yang dalam model politik Indonesia disebut sebagai salah satu infrastruktur politik Indonesia, yang menanggapi mahasiswa demonstrasi.

Tabel 6. Resume Unit Analisis Berita Harian Waspada

No.	Berita Harian Waspada	Resume
1.	“HMI Bireuen Tolak Revisi UU KPK” Edisi Sabtu, 20 September 2019	Dalam pemberitaan “HMI Bireuen Tolak Revisi UU KPK”. Waspada pada pemberitaan ini menjelaskan secara singkat dan penggunaan kata-kata tegas dalam isi beritanya. Menonjolkan pernyataan anggota legislatif dalam berita. Waspada banyak memuat pandangannya terhadap kasus tersebut. Waspada menggunakan unsur grafis

		untuk mendukung kebenaran pemberitaan. Dengan memperlihatkan gambar Ketua Sementara DPRK menyerahkan surat pernyataan kepada Mahasiswa HMI.
2.	“Kami Sudah Penuhi Tuntutan Tolong Mahasiswa Pulang” Edisi Rabu, 25 September 2019	Pada pemberitaan “Kami Sudah Penuhi Tuntutan Tolong Mahasiswa Pulang”. Waspada banyak memasukkan pernyataan narasumber dari anggota DPR. Waspada menggunakan kata-kata istilah yang sulit dipahami pembaca. Pemberitaannya diungkapkan secara terang-terangan. Waspada menambahkan usur grafis untuk mendukung pemberitaan akan tetapi kurang sesuai dengan pembahasan dalam berita. Karena yang diperlihatkan digambar adalah kericuhan mahasiswa, sedangkan pembahasan dalam berita adalah respon DPR terhadap mahasiswa demonstrasi.
3.	“Ratusan Mahasiswa UIN Duduki Ruang Paripurna DPRA” Edisi Kamis, 26 September 2019	Pemberitaan “Ratusan Mahasiswa UIN Duduki Ruang Paripurna DPRA”. Waspada menjelaskan secara detail isi berita yaitu tujuan mahasiswa demonstrasi. Menggunakan kata-kata istilah yang sulit dipahami. Waspada terbuka dan berani dalam menuliskan berita ini dan sangat kritis dalam memberitakan masalah kontroversial tentang RUU KUHP. Mengungkapkan isi berita secara terang-terangan. Selain itu, Waspada juga menambahkan grafis yang mendukung berita bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi.

Sebagai surat kabar yang Islami Waspada menganggap pemberitaan Demonstrasi mahasiswa tentang penolakan RUU KUHP adalah sebuah peristiwa besar yang termasuk bagian dari berita penting yang harus diungkapkan kebenarannya, sehingga dalam pemberitaannya Waspada cukup intens dalam menyampaikan berita. Hal ini dikarenakan peristiwa demonstrasi mahasiswa

berkaitan dengan masalah hak asasi manusia terhadap setiap individu masyarakat dalam berwarga dan bernegara untuk menjalankan atau mempedomani hukum pidana serta kekuasaan yang dikeluarkan dari pemerintahan.

Waspada memberikan perhatian yang besar terhadap peristiwa demonstrasi mahasiswa dengan banyak menyampaikan pandangannya. Hal ini terlihat ketika Harian Waspada memuat berita lebih banyak daripada media Harian Analisa. Dijelaskan satu persatu peristiwa yang terjadi diberbagai daerah yang dicantumkan penuh dalam lembar pertama di media cetak koran pada bagian *headline*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui pemberitaannya Waspada sangat mementingkan suara rakyat khususnya penolakan RUU KUHP. Jadi, Harian Waspada menyampaikan pemberitaan demonstrasi mahasiswa menggunakan *frame* bidang sosial. Karena terlihat dari peristiwa yang dikumpulkan oleh Harian Waspada, wartawan Harian Waspada lebih menyoroti tindakan mahasiswa yang berdemonstrasi yang merupakan bagian dari sebuah peristiwa sosial. Sangat terlihat sekali kepedulian wartawan Harian Waspada terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi.

Setelah analisis terhadap dua media di atas, maka peneliti menambahkan satu analisis yaitu komparasi analisis *framing* antara kedua media tersebut.

Harian Analisa menggunakan lebih banyak pilihan kata yang membatasi pandangan untuk membatasi informasi dan pemikiran pembaca mengenai suatu realitas peristiwa dalam pemberitaan demonstrasi mahasiswa. Sedangkan, Harian Waspada cenderung menggunakan pilihan kata untuk mengiring pembaca ke arah pemikiran tertentu yang diinginkan media. Tata bahasa yang digunakan Harian

Analisa dan Harian Waspada dominan menggunakan kalimat pernyataan aktif dari narasumber dalam pemberitaan demonstrasi mahasiswa. Harian Analisa kurang mengikuti perkembangan peristiwa demonstrasi mahasiswa, sehingga berita yang diterbitkan kurang luas secara keseluruhan terutama peristiwa demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah Sumatera Utara. Sedangkan, Harian Waspada sangat mengikuti perkembangan peristiwa demonstrasi mahasiswa berhubungan dalam pemberitaan demonstrasi mahasiswa.

Penggunaan kata istilah di Harian Analisa menggunakan kata istilah yang lebih mudah dipahami pembaca. Sedangkan, Harian Waspada menggunakan kata istilah dalam pemberitaan demonstrasi mahasiswa sulit dipahami oleh pembaca seperti kata “kebiri” dan “satire”. Artinya istilah tersebut harus diartikan terlebih dahulu oleh pembaca agar bisa dipahami pembaca apa maksud dari pemberitaan media.

Meski demikian, Harian Analisa dan Harian Waspada memperlihatkan lebih dominan sikap terhadap pihak-pihak tertentu, apakah itu kekuasaan ataupun masyarakat, dalam pemberitaan demonstrasi mahasiswa. Kedua media belum sepenuhnya memenuhi sikap independen dan netral dalam penulisan berita. Netral itu belum tentu independen karena netral berarti setara sementara independen yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan kode etik jurnalistik. Menurut Pasal 1 Kode Etik Wartawan Indonesia berbunyi: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Dalam penafsirannya disebutkan bahwa “1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur

tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.”

Selain itu, menurut kaidah 9 Elemen Jurnalisme yang dikeluarkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, yang menjadi kode etik umum dari wartawan hampir di seluruh dunia, menyebutkan, di elemen pertamanya yaitu “Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran”. Sehingga, wartawan tidak melihat pada pihak yang harus didukungnya apakah itu pemerintah atau masyarakat itu sendiri, melainkan pada kebenaran.

Selain itu, hal itu juga terlihat karena adanya keterlibatan kepentingan pribadi penulis karena media pro terhadap kekuasaan dan sistem yang berlaku. Hal ini terlihat dari berapa jumlah berita yang diterbitkan di media cetak koran: Harian Analisa jauh lebih sedikit memuat berita tentang demonstrasi mahasiswa daripada Harian Waspada. Sedangkan media Harian Waspada terlihat lebih pro terhadap masyarakat karena terlihat dari jumlah berita yang diterbitkan di media cetak koran berbeda jauh dengan media Harian Analisa, Harian Waspada banyak memuat dan membahas peristiwa tentang demonstrasi mahasiswa. Sehingga menampilkan berita yang timpang dan tidak berimbang. Harian Analisa memuat berita sebanyak 17 berita dan Harian Waspada memuat berita sebanyak 23 berita di bulan September 2019.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Harian Analisa dan Harian Waspada sama-sama mengikuti perkembangan peristiwa demonstrasi mahasiswa dan membuat frame yang berbeda dalam pemberitaannya. *Frame* yang digunakan oleh Harian Analisa yakni *frame* di bidang hukum dan sosial politik. Sedangkan, Harian Waspada menyampaikan pemberitaan demonstrasi mahasiswa menggunakan *frame* bidang sosial. Harian Analisa membingkai peristiwa sedemikian rupa sehingga berita yang dimuat mengarah pada kekuasaan dan pemerintahan. Harian Waspada membingkai peristiwa dengan mengarah kepada hak asasi manusia sehingga berita yang dimuat lebih kepada suara rakyat.
2. Ada perbedaan frame yang ditunjukkan oleh Harian Analisa dan Harian Waspada. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan pilihan kata, tata bahasa, skop pemuatan berita, hingga narasumber berita, sehingga hal ini memengaruhi sikap independensi dan netralitas dalam penulisan berita di kedua harian ini.

5.2. Saran

1. Bagi media diharapkan agar lebih objektif dalam penyampaian, dan tidak menyinggung atau merugikan sebelah pihak. Karena terkadang terdapat kata – kata tersebut didalam Judul, ataupun kata – kata yang terdapat dalam teks media itu sendiri. Seharusnya media memberitakan berita yang netral sesuai

objektif jurnalistik dan tidak menyinggung atau merugikan sebelah pihak agar menciptakan pembaca yang lebih rasionalitas dalam mengartikan sebuah pemberitaan yang disampaikan.

2. Bagi pembaca diharapkan dalam membaca berita agar tidak langsung terpengaruh oleh berita yang dimuat di media cetak. Akan tetapi lebih bijak menyikapi pemberitaan tersebut agar tidak salah arti dalam mengartikan berita tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik Petunjuk teknis Menulis berita*. Erlangga: Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Ikrar Mandiriabadi: Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-Dp/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/Sk-Dp/Iii/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. 13 Januari 2019.
(https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/1907030645_2008_Peraturan_DP_NO_06_TTG_PENGESAHAN_SURAT_KEPUTUSAN_DEWAN_PERS_NOMOR_03SK-DPIII2006_TENTANG_KODE_ETIK_JURNALISTIK_SEBAGAI_PERATURAN_DEWAN_PER.pdf).
- El Muhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Eriyanto. 2003. *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LkiS: Yogyakarta.
- _____. 2018. *Media dan Opini Publik Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting), Melakukan Pembingkai (Framing), & Mengarahkan Pandangan Publik (Priming)*. Rajagrafindo Persada: Depok.
- HM, Zaenuddin. 2011. *The Journalist ; Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor, Mahasiswa*. Simbiosis Rekatama Media: Bandung.
- Idhom, M Addi. 2019. *Isi RUU KUHP & Pasal Kontroversial Penyebab Demo Mahasiswa Meluas*. Tirto.id. 12 Jan. 2019 (<https://tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu>).
- Kusumaningrat, Hikmat & Kusumaningrat, Purnama. 2005. *Jurnalistik Teori & Praktik*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nurudin. 2013. *Pengantar Komunikasi Massa*. Rajagrafindo Persada: Depok.

PakarKomunikasi.com. Teori Komunikasi Massa. Teori Agenda Setting Dalam Komunikasi (Agenda Setting Theory).

(https://pakarkomunikasicom.cdn.ampproject.org/v/s/pakarkomunikasi.com/teoriagendasetting/amp?amp_js_v=a3&_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15960312873865&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fpakarkomunikasi.com%2Fteori-agenda-setting).

Rivers, William L. dkk. 2003. *Media Massa & Masyarakat Modern*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Roudhonah. 2019. *Ilmu Komunikasi*. Rajagrafindo Persada: Depok.

Romli, Khomsahrial. 2016. *Komunikasi Massa*. Grasindo: Jakarta.

Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis "Framing"*. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Syahputra, Iswandi. 2019. *Media Relation Teori, Strategi & Intelijen*. Rajagrafindo Persada: Depok.

Tamburaka, Apriadi. 2012. *Agenda Setting Media Massa*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Situs Dewan Pers. 13 Januari 2019. (<https://dewanpers.or.id/assets/documents/uu/UU-No.-40-Tahun-1999-tentang-Pers.pdf>).

Wikipedia. *Waspada (Surat kabar)*. 12 Januari 2019. ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/waspada_\(surat_kabar\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/waspada_(surat_kabar))).

_____. *Analisa (Surat kabar)*. 12 Januari 2019. ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/analisa_\(surat_kabar\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/analisa_(surat_kabar))).

004.16.311.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 19 Desember 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : PATNA SARI HARAHAP
N P M : 1603110158
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Tabungan sks : 127... sks, IP Kumulatif 3,54

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Penerapan Kode etik Jurnalistik tentang Prinsip berimbang Pemberitaan berita kriminal di surat kabar waspada Medan	
2	Analisis Framing Pemberitaan Demonstrasi mahasiswa tentang Penolakan RUU LKHP di harian waspada dan Analisa Medan Edisi September 2019	✓ 19/12-2019
3	Opini Wartawan Waspada Medan terhadap faktor Penghambat dalam Peliputan berita	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 19 Desember 2019.

Ketua,

(Murchasah.Nasution.Sos.DA.I.Kom)

Pemohon,

 (PATNA SARI HARAHAP.....)

PB: Nirwansyah

*) dilampirkan setelah judul ditandatangani oleh Ketua Jurusan



Enggah, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**

Nomor : 004.16.311/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : **19 Desember 2019** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RATNA SARI HARAHAP**
 N P M : 1603110158
 Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020
 Judul Skripsi : **ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DEMONSTRASI MAHASISWA TENTANG PENOLAKAN RUU KUHP DI HARIAN WASPADA DAN ANALISA MEDAN EDISI SEPTEMBER 2019**
 Pembimbing : NIRWANSYAH PUTRA, S.Sos., M.Sos.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 19 Desember 2020.

Ditetapkan di Medan,
 Medan, 12 Jumadil Awal 1441 H
 08 Januari 2020 M

Dekan

Dr. ARIF SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 27 Januari 2019.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : PATNA SARI HARAHAR
N P M : 1603110158
Jurusan : ILMU KOMUNIKASI

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 004.16/SK/II.3/UMSU-03/F/20.20 tanggal 19 DESEMBER 2019 dengan judul sebagai berikut :

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DEMONSTRASI MAHASISWA TENTANG
PENOLAKAN RUU KUHP DI HARIAN WASPADA DAN ANALISA
MEDAN EDISI SEPTEMBER 2019

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprososal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(NURWAN SYAH PUTRA S.SOS.M.SOS)

Pemohon,

(.PATNA SARI HARAHAR.....)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 049/KEP/II.3-AU/UMSU-03/17/2020

Program studi : Ilmu Komunikasi
 Hari, Tanggal : Selasa, 28 Januari 2020
 Waktu : 09.00 WIB s/d. Selesai
 Tempat : Ruang 306 Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
11	RATNA SARI HARAHAP	1603110158	Dr. PUJI SANTOSO, S.S. M.SP	NIRWANSYAH PUTRA, S.Sos., M.Sos.	ANALISIS FRAMING PEMBERTAAN DEMONSTRASI MAHASISWA TENTANG PENOLAKAN RUU KUHP DI HARIAN WASPADA DAN ANALISA MEDAN EDISI SEPTEMBER 2019
12	RENI MONIKA FEBRIYANTI	1603110111	Dr. IRWAN SYARI T.J.G. S.Sos., M.AP.	NIRWANSYAH PUTRA, S.Sos., M.Sos.	REPRESENTASI NILAI ISLAM PADA FILM "AJARI AKU ISLAM" (ANALISIS NARATIF)
13	BELLA SHAVIRA HERMAN	1603110082	NIRWANSYAH PUTRA, S.Sos., M.Sos.	AKHYAR ANSHORI S.Sos., M.I.Kom	PEMANFAATAN APLIKASI YOUTUBE SEBAGAI SARANA MENYEBARLUASKAN BERITA OLEH KOMPAS TV BIRO MEDAN
14	TRICORY INDAH SARI	1603110025	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si	NURHASANAH NASUTION, M.I.Kom.	PERSONAL BRANDING JAKA & DARA KOTA MEDAN DALAM MEMROMOSIKAN PARIWISATA DI KOTA MEDAN
15	CHAIRUNNISA UTAMI	1603110127	Dr. PUJI SANTOSO, S.S. M.SP	Dr. IRWAN SYARI T.J.G. S.Sos., M.AP.	PERAN MEDIA INTERNAL MAJALAH MINAT DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI KARYAWAN PTPN IV MEDAN

Medan, 02 Jumadil Akhir 1441 H
 27 Januari 2020 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **PATNA SARI HARAHAP**
NPM : **1603110150**
Jurusan : **ILMU KOMUNIKASI**
Judul Skripsi : **ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DEMONSTRASI MAHASISWA TENTANG PENOLAKAN BILU KUHP DI HARIAN WASPADA DAN ANALISA MEDAN EDISI SEPTEMBER 2019**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	19/02/2019	Diskusi Judul dan Perubahan Judul.	
2.	15/02/2020	Pemeriksaan Proposal Skripsi.	
3.	18/02/2020	Revisi Proposal Skripsi.	
4.	27/02/2020	ACC Proposal Skripsi	
5.	05/02/2020	Hasil Seminar dan Keangjutan Skripsi	
6.	19/02/2020	membahas Keangjutan Skripsi Bab IV	
7.	09/03/2020	Bimbingan Skripsi Bab IV	
8.	17/03/2020	Revisi Bab IV	
9.	14/03/2020	ACC Bab IV dan Revisi Bab V	
10.	19/06/2020	Revisi Skripsi	
11.	22/06/2020	SKRIPSI ACC	

Medan, 23 Juni 2020

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

(Dr. Ariawan Salsus, S.Sos, M.Pd.)

(Nurhasanah Nasution, S.Sps, M.ILKOM)

(Niwunyah Purton)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI:

Nomor : 404/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Pogram Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Selasa, 28 Juli 2020
Waktu : 08.30 s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJUI I	PENGUJUI II	PENGUJUI III	
1	NURUL KHOTIMAH	1603110002	NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom	TENERMAN, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. RUDIANTO., M.Si.	SIKAP PROFESIONALISME WARTAWAN TELEVISI (STUDI PADA JURNALIS TVRI MEDAN SUMATERA UTARA)
2	AHMAD KHOLIS RAMBE	1503110222	Dr. RUDIANTO., M.Si.	CORRY NOVRIKA AP. SINAGA, S.Sos., M.A.	TENERMAN, S.Sos., M.I.Kom.	PENGARUH BRAND IMAGE WELL DO & CO TERHADAP MINAT BELI MAHASISWAI UMSU
3	SAYED FATUR RAHMAN	1403110213	NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	CORRY NOVRIKA AP. SINAGA, S.Sos., M.A.	STRATEGI PROMOSI WEDDING ORGANIZER CUQOW DALAM MENJAGA EKSISTENSI
4	RATNA SARI HARAHAP	1603110158	NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom	CORRY NOVRIKA AP. SINAGA, S.Sos., M.A.	NIRWANSYAH PUTRA, S.Sos., M.Sos.	ANALISIS FRAMING PEMBERTAAN DEMONSTRASI MAHASISWA TENTANG PENOLAKAN RUU KUHP DI HARIAN WASPADA DAN ANALISA MEDAN EDISI SEPTEMBER 2019
5	SUHERMAN	1503110077	Dr. RUDIANTO., M.Si.	NIRWANSYAH PUTRA, S.Sos., M.Sos.	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	FUNGSI PUBLIK RELATIONS DALAM MENYAMPAIKAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Notulis Sidang:

1.

Diletakkan oleh :



Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH., M.Hum

Kejua,



Panitia Ujian

Medan, 28 Dzulqaidah 1441 H
20 Juli 2020 M

Sekretaris

Drs. ZULYAHMI, M.I.Kom

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : RATNA SARI HARAHAP
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Sidap-dap, 27 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 5 (lima) Dari 5 (lima) Bersaudara
Alamat : Simanosor Julu Kec. SDH Kab. Tapsel
No. Telephone : 082175772221

Data Orang Tua

Nama Ayah : PAMUSUK HARAHAP
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : MUTIARA SIREGAR
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Simanosor Julu Kec. SDH Kab. Tapsel

Data Pendidikan Formal

2003-2004 : TK Swasta Pesantren Darul Mursyid
2004-2010 : SDN 101970 Sidap-dap
2010-2013 : MTSN Sipagimbar
2013-2016 : MAN 1 Padangsidimpuan
2016-2020 : S1 Ilmu Komunikasi UMSU